

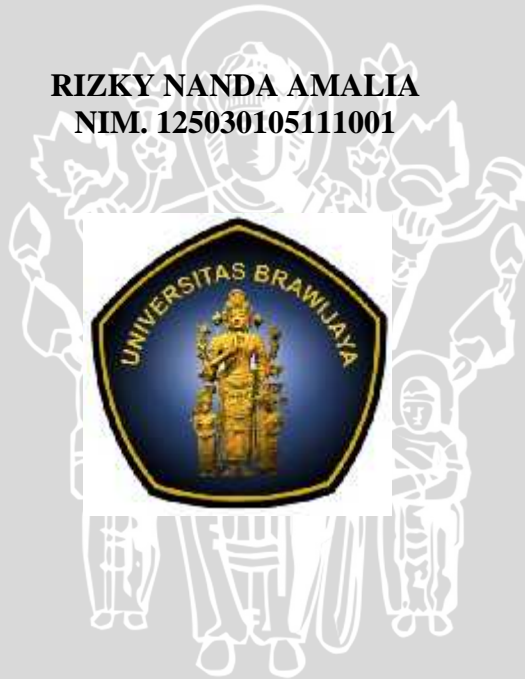
# **IMPLEMENTASI PROGRAM WASTE TO ZERO DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

**( STUDI TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* /  
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA SMIF GRESIK )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**RIZKY NANDA AMALIA  
NIM. 125030105111001**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2016**

## MOTTO

*“ Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lainnya).”*

*(Surat Al-Insyirah: 7)*



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program *Waste to Zero* di Bidang Lingkungan  
Hidup ( Studi tentang *Corporate Social Responsibility* /  
Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada SMIF Gresik )

Disusun oleh : Rizky Nanda Amalia

NIM : 125030105111001

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 08 Agustus 2016


### Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Mochammad Makmur, M.S  
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota



Dr. Mochammad Rozikin, M.AP  
NIP. 19630503 198802 1 001



**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 18 Agustus 2016  
Jam : 09.00-10.00  
Skripsi atas nama : Rizky Nanda Amalia  
Judul : Implementasi Program *Waste To Zero* Di Bidang Lingkungan Hidup  
(Studi Tentang *Corporate Social Responsibility/Tanggungjawab Sosial*  
Perusahaan Pada SMIF Gresik)

**Dan Dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua Komisi Pembimbing,



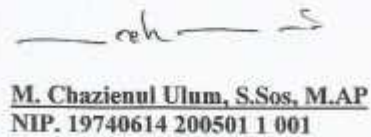
**Dr. Mochammad Makmur, M.S**  
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota Komisi Pembimbing,



**Dr. Mochammad Rozikin, M.AP**  
NIP. 19630503 198802 1 001

Penguji I,



**M. Chaziennul Ulum, S.Sos, M.AP**  
NIP. 19740614 200501 1 001

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 08 Agustus 2016



Rizky Nanda Amalia

NIM. 125030105111001

## RINGKASAN

Rizky Nanda Amalia, 2016, **Implementasi Program *Waste to Zero* di Bidang Lingkungan Hidup (Studi tentang *Corporate Social Responsibility / Tanggungjawab Sosial Perusahaan* pada SMIF Gresik)**, Dr. Mochammad Makmur, M.S, Dr. Mochammad Rozikin, M. AP

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini metode proses analisis data yang digunakan adalah metode analisis data *Miles Huberman dan Saldana* dengan tahapan koleksi data, kondensasi data, penyajian data, serta terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan program *waste to zero* yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik sudah berjalan baik oleh Semen Indonesia Foundation. Pelaksanaan *waste to zero* di bidang lingkungan hidup ini dibangun dengan koordinasi dari pihak Semen Indonesia Foundation dan Badan Lingkungan Hidup yang ikut berperan dalam pelaksanaan program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup. Pabrik pengelolaan sampah yang dibangun oleh Semen Indonesia Foundation ini semata-mata ingin membantu Pemerintah Daerah Kota Gresik dalam mengatasi penumpukan yang setiap hari semakin menumpuk semakin banyak dari tahun ke tahun. Selain itu, yang perlu diperhatikan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik harus memiliki perda tentang pengelolaan sampah.

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai perusahaan yang peduli lingkungan Semen Indonesia Foundation (SMIF) sebaiknya mengadakan seminar mengenai peduli lingkungan untuk memberikan pengertian dan pengetahuan kepada masyarakat dalam mengatasi sampah yang ada di sekitar kita. Selain itu juga Pemerintah harus mempunyai solusi/inovasi baru untuk mengatasi sampah yang tiap hari semakin menumpuk. Tidak hanya mengatasi tetapi pemerintah harus mencari lahan untuk pembuangan sampah karena lahan yang saat ini dipakai untuk pembuangan adalah lahan milik PT. Semen Indonesia.

**Kata Kunci : Implementasi Program, Lingkungan Hidup, *Waste to Zero***



## SUMMARY

Amalia Rizky Nanda, 2016, **Implementation of Waste to Zero Program in the Field of Environment (Study on Corporate Social Responsibility / Corporate Social Responsibility in the SMIF Gresik)**, Dr. Mochammad Makmur, M: S, Dr. Mochammad Rozikin, M. AP

This study describes the implementation of waste to zero in the environmental field were implemented in the city of Gresik. The objective of this study is to describe and analyze the implementation of the program of waste to zero in the environmental field were implemented in the city of Gresik to know, describe and analyze factors inhibiting the implementation of waste to zero in the environmental field.

This type of research in this study was a descriptive study using a qualitative approach. In this study, the method of data analysis is from Miles Huberman and Saldana that consist of data collection, condensation, data presentation, as well as the final conclusion or verification.

The results showed that overall waste to zero the program implemented in the city of Gresik has been running well by the Indonesian Cement Foundation. Implementation of waste to zero in the environmental field is built with the coordination of the Indonesian Cement Foundation and the Environment Agency who had a role in the implementation of waste to zero in the environmental field. Waste management factory built by the Indonesian Cement Foundation is solely want to assist local governments in addressing the buildup of Gresik that every day more and accumulate more and more from year to year. In addition, to note that the Regional Government of Gresik must have local regulations concerning waste management Gresik yet.

Recommendations are given based on this research are as environmentally conscious company Semen Indonesia Foundation (SMIF) should hold a seminar on the care environment to provide knowledge and understanding of the community in addressing the waste that exists around us. In addition, the government needs to have solutions / innovations to address the garbage every day accumulating. Not only to overcome but the government should look for land for waste disposal because the land is currently used for disposal is land owned by PT. Semen Indonesia.

Keywords: Program Implementation, Environmental, Waste to Zero

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Implementasi *E-Government* Dalam pelayanan Publik (Studi pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang).” Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi.

Atas tersusunnya skripsi ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan tulus ikhlas. Pada kesempatan ini disampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku ketua Prodi Jurusan Ilmu Administrasi Publik
4. Bapak Dr. Mochammad Makmur, MS selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Mochammad Rozikin, M.AP selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta bantuan selama penulis menuntut ilmu di sini.
7. Bapak Soesetyoko Soewandi, SE. selaku Ketua Pengurus Semen Indonesia Foundation.
8. Bapak Hari Sugiantono selaku Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan Semen Indonesia Foundation.



9. Bapak Yusuf Efendi selaku Manajer Divisi Pengelolaan Lingkungan Semen Indonesia Foundation.
10. Bapak R. Haryanto P. selaku Wakil Manajer Divisi Pengelolaan Lingkungan Semen Indonesia Foundation.
11. Seluruh pegawai Semen Indonesia Foundation atas bantuannya selama penelitian berlangsung.
12. Terima kasih untuk kedua orangtua saya (Bambang Subagyo&Nyi Ade Taty Setiawati) dan keluarga saya yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi.
13. Terima kasih untuk teman saya Maya, Azmy, Riri, Tiananda, Dina, Dewi, Intan, Eva, dan Astrid yang selalu mendukung dalam pengerjaan skripsi ini Semoga kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat dan sukses.
14. Terima kasih untuk Mbak Muthiah (mbak tum) yang selalu sabar membimbing dan selalu mendukung dalam pengerjaan skripsi ini dan selalu menemani.
15. Teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi terutama Jurusan Administrasi Publik dan Kelas A angkatan 2012 yang selalu mendukung dalam pengerjaan skripsi ini serta masih banyak lainnya yang selalu menemani dalam menjalani kuliah di Malang selama ini. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat dan sukses.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan penulis sehingga skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Amin.

Malang, 08 Agustus 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MOTTO</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>RINGKASAN</b> .....	v
<b>SUMMARY</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Implementasi Program.....	10
1. Program.....	10
2. Implementasi Program.....	12
3. Aktor Implementasi Program.....	15
B. <i>Governance</i> .....	17
1. Definisi <i>Governance</i> .....	17
2. <i>Corporate Governance</i> .....	17
3. <i>Good Corporate Governance</i> .....	19
4. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	21
5. Pilar-pilar <i>Good Corporate Governance</i> .....	24
6. Lingkup <i>Good Corporate Governance</i> .....	25
C. Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> )... ..	26
1. Definisi Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ).....	26
2. Pembangunan Berkelanjutan Bidang Lingkungan.....	29
D. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	35
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	35
2. Prinsip-prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	36
3. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	39
4. Ruang Lingkup <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	40
5. Model atau Pola <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	41





6. Bentuk-bentuk <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	43
7. Keuntungan CSR bagi perusahaan.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Fokus Penelitian.....	48
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	50
D. Jenis dan Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Instrumen Penelitian.....	54
G. Analisis Data.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Gresik.....	58
a. Sejarah Kabupaten Gresik.....	58
b. Keadaan Geografis.....	60
c. Kondisi Penduduk.....	62
d. Visi dan Misi Kabupaten Gresik.....	65
2. Gambaran Umum Semen Indonesia Foundation.....	66
a. Sejarah Semen Indonesia Foundation.....	66
b. Visi dan Misi Semen Indonesia Foundation.....	68
c. Tugas Pokok dan Fungsi Semen Indonesia Foundation.....	68
d. Struktur Organisasi Semen Indonesia Foundation..	72
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	77
1. Implementasi Program <i>Waste to Zero</i> di bidang Lingkungan Hidup.....	77
a. Aktor yang Terlibat.....	77
b. Bentuk Kegiatan.....	83
c. Dukungan SDM dan Biaya.....	93
d. Tujuan (capaian).....	95
2. Faktor-faktor penghambat dari Implementasi Program <i>Waste to Zero</i> di bidang Lingkungan Hidup.....	97
C. Pembahasan.....	100
1. Implementasi Program <i>Waste to Zero</i> di bidang Lingkungan Hidup.....	100
a. Aktor yang Terlibat.....	100
b. Bentuk Kegiatan.....	101
c. Dukungan SDM dan Biaya.....	101
d. Tujuan (capaian).....	104
2. Faktor-faktor penghambat dari Implementasi Program <i>Waste to Zero</i> di bidang Lingkungan Hidup.....	105
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	106
A. Kesimpulan.....	106



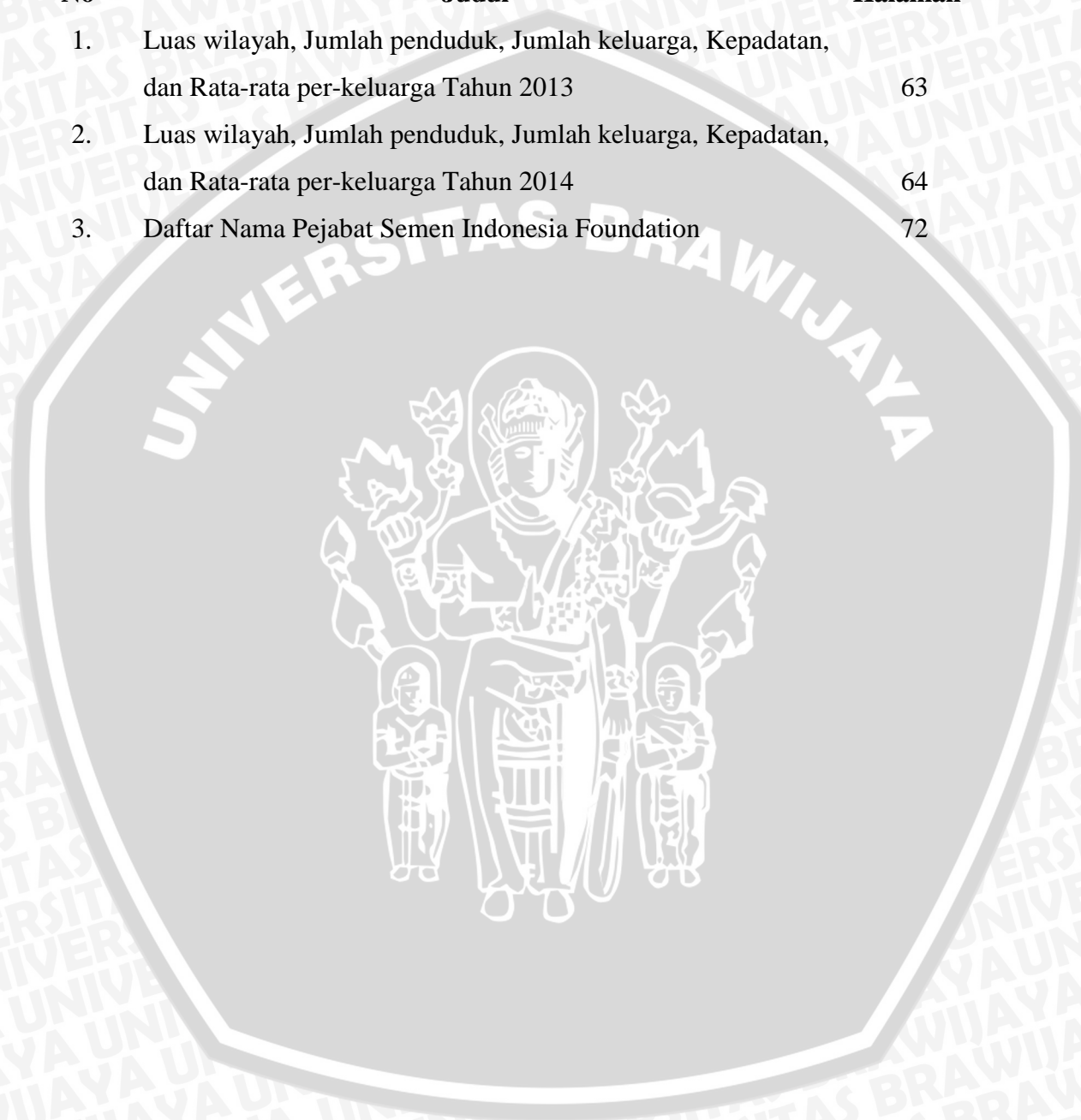
B. Saran..... 108

**DAFTAR PUSTAKA..... 109**



## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Luas wilayah, Jumlah penduduk, Jumlah keluarga, Kepadatan, dan Rata-rata per-keluarga Tahun 2013	63
2.	Luas wilayah, Jumlah penduduk, Jumlah keluarga, Kepadatan, dan Rata-rata per-keluarga Tahun 2014	64
3.	Daftar Nama Pejabat Semen Indonesia Foundation	72



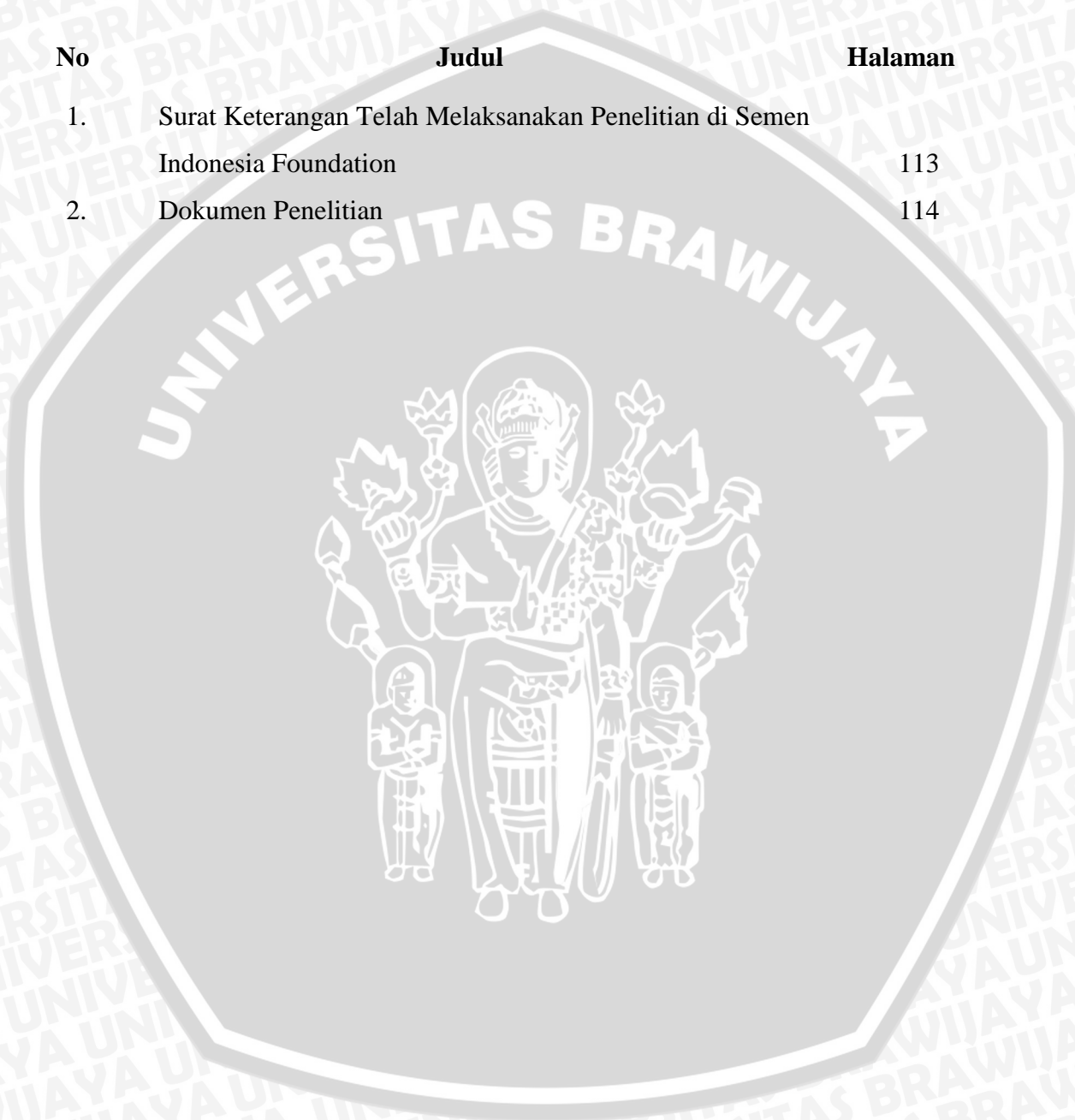
## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Model Kesesuaian Implementasi Program (Korter)	14
2.	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	56
3.	Peta Wilayah Kabupaten Gresik	62
4.	Struktur Organisasi Semen Indonesia Foundation	72
5.	Timbulan Sampah Yang Masuk ke TPA	84
6.	Lokasi TPA di Ngipik	86
7.	Jenis-jenis Sampah	87
8.	<i>Design Capacity</i>	90
9.	Aliran Operasional	91
10.	Struktur organisasi Tenaga Kerja	93
11.	Rincian Biaya yang akan dicapai	94
12.	Alur Proses “Waste to Zero” Produksi RDF ( Refuse Derived Fuel )	96



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Semen Indonesia Foundation	113
2.	Dokumen Penelitian	114



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai permasalahan sampah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya lahan pembuangan sampah Kota yang diakibatkan banyaknya pabrik-pabrik yang mencemari lingkungan dengan sampah yang susah untuk di daur ulang. Kabupaten Gresik memiliki luas 1.191,25 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Sosial Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2012 sebesar 1.307.995 jiwa. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan gangguan kesehatan, pencemaran tanah, pencemaran air, dan berkurangnya nilai kebersihan dan keindahan lingkungan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup, yaitu “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Jika dilihat dari definisi yang telah dikemukakan, maka lingkungan hidup memiliki peran penting bagi manusia karena merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati dan non hayati yang seluruh

komponen di dalamnya memiliki pengaruh yang kuat bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Di Indonesia, pengelolaan sampah secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Salah satu tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan sampah sebagaimana disebutkan pada Pasal 6, yaitu melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Manusia bagian dari lingkungan hidup memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar terhindar dari pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan. Berbagai masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia, salah satu penyebabnya ialah masalah persampahan yang merupakan persoalan nasional dan sulit menemukan pemecahan optimal. Masalah sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah.

Sebagai perusahaan besar Semen Indonesia tidak lepas dari limbah buangan atau sampah yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan. Semen Gresik Foundation (SGF) atau Semen Indonesia Foundation (SMIF) selaku yayasan peduli lingkungan milik Semen Indonesia membuat proyek pengelolaan sampah di TPA Ngipik Gresik yang merupakan lokasi bekas tambangnya tersebut. Akan tetapi kondisi TPA yang dengan keterbatasan lahan yang hanya luas 6 hektar kini menjadi alasan pertama untuk dikelolanya proyek *waste to zero* dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Gresik yang nyaman dengan pengelolaan



sampah yang ramah lingkungan serta hasil dari pengelolaan akan dimanfaatkan untuk penggunaan limbah sebagai bahan baku produk, limbah sebagai bahan bakar alternative, dan sebagai penanganan area bekas tambang.

*Waste to zero* ialah nama pabrik pengelolaan sampah yang dibuat SMIF untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menangani penumpukan sampah yang ada di Kota Gresik. Program *waste to zero* ini hanya bersifat sementara dikarenakan lahan milik Semen Indonesia yang berlokasi di Ngipik ini lahannya telah dipenuhi sampah yang menggunung dari berbagai Kabupaten yang ada di Gresik. Banyaknya tumpukan sampah SMIF memiliki inovasi baru dengan membuat pabrik pengelolaan sampah tersebut yang dimana sampah-sampah yang dikelola berasal dari seluruh Kota Gresik kecuali Bawean. Deposit sampah di TPA yang ada yaitu sekitar 210.000 ton dan akan ada penambahan sampah sekitar 220 ton per hari.

Tujuan dari program ini tidak lain yaitu untuk mengembangkan kesadaran lingkungan hidup, sehingga masyarakat Gresik dapat memahami prinsip-prinsip ekologi dalam kehidupan sehari-hari dalam bersahabat dengan alam dan lingkungan. Di samping itu, kemajuan industri juga mendorong kepeduliannya terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Dengan *waste to zero* ini akan mendukung program efisiensi industry pemakai batu bara, minyak dengan energy terbarukan bisa digantikan dengan pengelolaan sampah kota "*Municipal Solid Waste*" (*MSW*) menjadi *RFD (Refuse Derived Fuel)* serta bagi Semen Indonesia bisa mengangkat upaya industrinya sebagai green industri serta konservasi sumber

daya dan upaya penyelamatan lingkungan akibat penimbunan sampah kota yang menumpuk di TPA dan di biarkan begitu saja.

Sedangkan pada kondisi lapangan di TPA Ngipik Gresik sekarang telah terjadi penumpukan/timbunan sampah tiap harinya dengan volume sekitar 220 ton. *Waste to Zero* yang di programkan Semen Indonesia ini diharapkan bisa menjadi motivasi seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah daerah dalam mengelola TPA dengan sistem pengelolaan yang baik sehingga dapat menghasilkan manfaatnya dalam mengelola TPA serta lingkungan menjadi aman, nyaman, dan sehat dari dampak buruk yang ditimbulkan sampah jika tidak dikelola dengan baik.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah sebuah komitmen yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan untuk menjaga eksistensinya dan sebagai *feedback* antara perusahaan dan lingkungan serta masyarakat yang berada di ring area atau wilayah dimana perusahaan tersebut berdiri. Hal ini sependapat dengan pernyataan dari *The World Business Council for Sustainable Development* yang mendefinisikan bahwa :

*“Corporate Social Responsibility* adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komuniti setempat dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. (Budimanta, et al, 2005:73).”

Tanggung jawab sosial perusahaan ini sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan umpan balik yang baik antara organisasi perusahaan dengan lingkungan sekitar dan masyarakat serta sebagai penentu kelangsungan hidup dan keberhasilan sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Adanya program-program CSR yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh perusahaan

sendiri merupakan suatu bentuk realisasi implementasi dari produk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimana suatu perusahaan juga harus memperhatikan sekitarnya dan bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar agar tidak ada pihak yang dirugikan atas dampak dari kegiatan yang dilakukan.

Landasan hukum perusahaan tentang *Corporate Social Responsibilities (CSR)* atau yang lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sekarang menjadi bagian yang harus ada dalam perusahaan khususnya yang berbadan hukum perseroan terbatas. Dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjadinya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan tanggungjawab



sosial dan lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada Bab V pasal 74 ayat 1-4 dijelaskan mengenai definisi dan sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini tetapi ini belum cukup karena masih bersifat umum dan belum dijelaskan tata cara pelaksanaannya. Sampai saat ini sepanjang pengetahuan saya, peraturan pemerintah belum dikeluarkan sebagai penjelasan tentang tata cara pelaksanaan dari undang-undang ini.

“Limbah buangan atau sampah yang ditimbulkan terutama di daerah perkotaan telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditanggulangi oleh para *stakeholders* yakni pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Masalah-masalah sampah yang timbul di kota-kota besar adalah karena sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan, dan pemusnahan sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, industri maupun kantor (Bahar, 1986:2)”.

Sampah ini sebenarnya memiliki daya jual yang tinggi, jika masyarakat mau mengelola menjadi produk yang dapat dipakai yang memiliki nilai seni dan ekonomi yang tinggi, selain itu manfaat lain yang diperoleh adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi serta menjaga kelestarian lingkungan. Perencanaan yang matang diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antar proses pengelolaan sampah dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan dan operasional. Saat ini paradigma baru yang ditopang oleh sumber daya manusia, peran serta masyarakat, visi kewirausahaan, kemampuan manajemen operasional, modal investasi, dan telah dipicu oleh perkembangan teknologi yang mengubah pola pandang banyak pihak terhadap sampah (Damanhuri dan Tri, 2011:121).

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti ingin lebih mengetahui penanganan atas permasalahan yang berkaitan dengan limbah buangan atau sampah yang ramah lingkungan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program *Waste To Zero* Sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Pada Semen Indonesia Foundation (SMIF) di PT. Semen Indonesia Kabupaten Gresik)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dari implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah berusaha untuk menjawab perumusan masalah yang telah dilakukan. Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diberikan maupun diperoleh dari penelitian ini antara lain :

##### **1. Manfaat Akademis**

- a. Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya kajian ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan Administrasi Publik.
- b. Sebagai bahan tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya dengan mengangkat topik yang sama.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan kajian bagi seluruh *stakeholders* yang terkait dengan pengelolaan sampah.
- b. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya peran aktif dalam pengelolaan sampah.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika penelitian.



## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis mengemukakan secara garis besar teoritis yang menjadi dasar bagi penulis dalam memberikan alternatif solusi atas segala permasalahan yang ada.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian yang dipakai, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis, dan keabsahan data yang digunakan.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian yang diperoleh yang terdiri dari gambaran umum organisasi yang menjadi lokasi penelitian dan data fokus penelitian serta analisis dan interpretasi terhadap data yang diperoleh.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang telah terlaksana, berlandaskan pada teori-teori sebagai kerangka berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana penelitian menyoroti masalah yang dipilih. Singarimbun (1995:37) menyebutkan teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan konstruksi, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

#### A. Implementasi Program

##### 1. Program

###### a. Pengertian Program

Program menurut Arikunto (1998:1) merupakan sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu program merupakan kegiatan yang direncanakan dan memiliki tujuan tertentu sehingga pencapaian keberhasilan tersebut juga dapat diukur. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa program merupakan kumpulan dari kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mengarahkan kepada satu tujuan tertentu dan dapat dinilai tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan dalam bentuk program tersebut.

## b. Macam-macam Program

Arikunto (1998:2) menyebutkan bermacam-macam wujud dari program, diantaranya adalah :

### (1) Tujuan

Program memiliki kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan dan ada yang sukarela. Sehingga program tersebut akan diukur berdasarkan pencapaian tujuan.

### (2) Jenis

Program berdasarkan jenis seperti program pendidikan, program pertanian, program pemberdayaan dan lain sebagainya yang pengklasifikasinya didasarkan berdasarkan isi kegiatan program. Cara pengukuran program berdasarkan jenis cenderung memiliki kesamaan sehingga kurang memberikan variasi dalam penilaian.

### (3) Jangka waktu

Program berdasarkan jangka waktu didasarkan pada lama waktu pengerjaan program tersebut. Jangka pendek adalah program yang pelaksanaannya kurang dari satu tahun, jangka menengah adalah program yang waktu pelaksanaannya antara satu sampai lima tahun, dan jangka panjang adalah program yang pelaksanaannya lebih dari lima (5) tahun.

### (4) Pelaksana

Program dikatakan kecil apabila dilaksanakan hanya oleh beberapa orang, sedangkan program besar dilaksanakan oleh berpuluh atau beratus pelaksana.



### c. Tujuan Penelitian Program

Arikunto (1998:10) menjelaskan bahwa tujuan penilaian program adalah mengukur keberhasilan program. Penilaian program juga berfungsi sebagai pembantu, pengontrol pelaksana program agar dapat diketahui tindak lanjut dari pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penilaian program dilakukan untuk menilai keberhasilan suatu program mencapai tujuannya dan menghasilkan pengambilan keputusan tersebut akan memunculkan empat (4) kemungkinan, yaitu ;

- (1) Dilanjutkan dan disembarkannya program tersebut karena berdampak positif bagi program yang bersangkutan dan diperkirakan akan berdampak sama apabila diterapkan pada program lain.
- (2) Dilanjutkan tetapi hanya pada program tersebut apabila ingin dilanjutkan kepada program lain diperlukan persyaratan khusus.
- (3) Dilanjutkan hanya pada program yang bersangkutan dan memerlukan perubahan, penambahan, atau penyempurnaan.
- (4) Dihentikan karena hasil penilaian program tersebut berdampak negatif atau tidak memiliki dampak yang signifikan bagi program tersebut maupun program lainnya.

## 2. Implementasi Program

Implementasi adalah suatu program yang disusun berdasarkan hasil perencanaan dengan menempuh langkah-langkah pokok, serta mencapai tujuan yang diharapkan (Djamarah, 2006). Adapun tahap-tahap dari implementasi :

### 1. Perencanaan

Menetapkan apa yang mau dilakukan, kapan dan bagaimana cara melakukannya. Mengumpulkan dan menganalisa informasi.

2. Pengorganisasian

Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan mengadakan latihan dan pendidikan.

3. Pengarahan

Membimbing dan memotivasi dan melakukan supervisi serta menyusun kerangka waktu.

4. Pengawasan

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dibandingkan dengan rencana menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi.

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.

Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

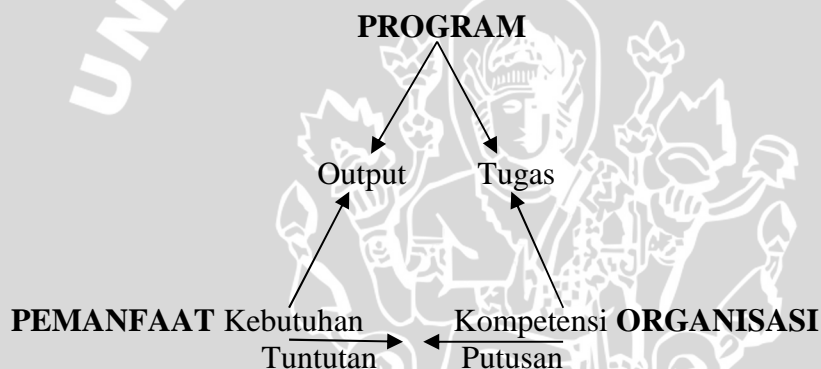
2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1. Model Kesesuaian Implementasi Program (Korten)**

Sumber : Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000:12)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, antara program dengan manfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi



pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran (Akib dan Tarigan, 2000:12).

Pada dasarnya implementasi adalah tahapan setelah program itu ditetapkan. Proses implementasi baru dapat dimulai jika tujuan serta sasaran dari sebuah program tersebut telah dibuat dan ditetapkan. Implementasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program yang telah ditetapkan tersebut dapat dirasakan manfaatnya untuk semua kalangan yang menjadi sasaran dari program tersebut.

### 3. Aktor Implementasi Program

Menurut Solichin Abdul Wahab (2015:130-132), dalam implementasi program khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi pemerintah, sebenarnya dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yakni :

- a. Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center atau pusat*),
- b. Pejabat-pejabat pelaksana lapangan (*the periphery*), dan
- c. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (*target group*).

Dilihat dari sudut pandang pusat, maka fokus analisis implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan keputusan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat tingkat yang lebih rendah/daerah, dalam

upaya mereka memberikan pelayanan atau mengubah perilaku masyarakat/kelompok sasaran dari program yang bersangkutan.

Dari sudut pandang pejabat-pejabat di lapangan, maka implementasi akan terfokus pada tindakan atau perilaku para pejabat dan instansi-instansi di lapangan, dalam upayanya menanggulangi gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya, yang berasal dari usaha-usaha pejabat-pejabat lain di luar instansinya demi berhasilnya suatu program. Pemahaman yang mendalam terhadap persepsi kelompok sasaran ini amat penting artinya bagi pejabat-pejabat pusat. Sebab, pemahaman semacam itu akan memungkinkan mereka untuk mengantisipasi umpan balik politik (*political feedback*) dan peka terhadap asumsi-asumsi keprilakuan (*behavioral assumptions*) yang mendasari penyusunan setiap program.

*Stakeholder* merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder* jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Setiap kebijakan tidak lepas dari peran berbagai aktor. Aktor dalam kebijakan dapat diartikan individu-individu atau kelompok-kelompok, dimana para pelaku ini terlibat dalam kondisi tertentu sebagai suatu subsistem kebijakan.



## B. Governance

### 1. Definisi Governance

Menurut Daniri (2005), *governance* kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun dalam konteks *good governance*, *governance* sering juga disebut tata pamong. Sementara itu, OECD (*Organization for Economic Corporation and Development*) mendefinisikan *good governance* sebagai berikut :

*“Governance is the system by which organizations is directed and controlled. The Good Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the organization, such as the board, managers, shakeholders, society, and the other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on organization objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance. (Pemerintahan adalah sistem dimana organisasi diarahkan dan dikendalikan. Struktur Pemerintahan yang Baik menentukan distribusi hak dan tanggung jawab antara peserta yang berbeda dalam organisasi, seperti dewan, manajer, shakeholders, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dan merinci aturan dan prosedur untuk membuat keputusan tentang tujuan organisasi yang ditetapkan , dan cara mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja).”*

Definisi *governance* menurut OECD ini adalah melihat *governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi, pengertian ini konsisten dengan Turnbull dimana keduanya fokus kepada bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### 2. Corporate Governance

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) seperti yang dikutip Tjager (2003:25-26) mendefinisikan *corporate governance* sebagai :

*“...seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang*



berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*shareholders*)”.

Dalam bukunya I Nyoman Tjager (2003:26-27), istilah *corporate governance* itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Dalam laporan ini mendefinisikan *corporate governance* sebagai “...*the system by which organizations are directed and controlled* (suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi)”. Adapun definisi lain dari *Cadbury Committee* yang dikutip Tjager (2003:26-27) memandang *corporate governance* sebagai :

“ *A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities.* (Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka)”.

*Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*

mendefinisikan *corporate governance* sebagai :

“*the structure through which shareholders, directors, managers, set of the board objective of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance.* (Struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan saran untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja)” (Tjager, 2003:27-28).

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem, proses, dan pengaturan yang mengatur dan

mengendalikan suatu organisasi perusahaan. Terutama hubungan para aktor yang berkepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal perusahaan. Adanya pengaturan ini adalah untuk mencapai tujuan perusahaan serta meminimalisir kesalahan-kesalahan serta penyimpangan pada perusahaan yang juga akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi perusahaan.

### 3. *Good Corporate Governance* (GCG)

*Good corporate governance* yaitu suatu proses, sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Sedangkan dalam arti sempit yaitu hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Good corporate governance* bertujuan untuk mengatur hubungan diantara *stakeholder* dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan kesalahan-kesalahan yang dapat segera diperbaiki.

Terdapat beberapa pengertian tentang *corporate governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholder*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

“ Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*)” (FCGI dalam Tjager, dkk, 2003:26).



Menurut Cadbury Committee pengertian dari *corporate governance* atau tata kelola perusahaan yaitu “seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka” (Cadbury Committee dalam Tjager, 2003:27)

Definisi lain dari Monks dan Minow memandang *corporate governance* atau tata kelola perusahaan yaitu “istilah ‘*corporate governance*’ mengacu kepada hubungan diantara tiga kelompok dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan” (Monks dan Minow dalam Djanegara, 2008:8). Konsep tata kelola perusahaan menurut Solomon dan Solomon yaitu *corporate governance* adalah “sistem cek dan balance antara pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan yang memberikan keyakinan bahwa perusahaan menjalankan akuntabilitasnya kepada semua *stakeholders* dan bertindak dalam kerangka pertanggung jawaban untuk seluruh area aktivitas perusahaan” (Solomon dan Solomon dalam Djanegara, 2008:8).

Dengan kata lain *corporate governance* mengacu pada metode dimana suatu organisasi diatur, dikelola, diarahkan, atau dikendalikan dan tujuan-tujuannya dapat tercapai. Berdasarkan pada pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan *good corporate governance* pada BUMN, Effendi menyatakan :

“ *Corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder*”



lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika” (Effendi dalam Tadikapury, 2011:6).

Adrian Sutedi menyatakan bahwa “*good corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*” (Sutedi, 2011:45). Terdapat 2 (dua) hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

#### **4. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance***

Terdapat berbagai macam peraturan dan sistem yang mengatur tentang keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan, sehingga perlu dibentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Sutedi (Tadikapury, 2011:8-9) terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *corporate governance*, yaitu :

##### **1. *Transparency* (keterbukaan)**

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan

pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

2. *Accountability* (dapat dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggungjawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

3. *Fairness* (kesetaraan)

Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

4. *Sustainability* (kelangsungan)

Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara dapat menghasilkan keuntungan mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa bertahan dan berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil,

dan menjadi karyawan yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi *stakeholder*-nya.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (Tjager, 2003:50-52) prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu :

a. *Fairness* (kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama terhadap pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk diri sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).

b. *Disclore dan Transparency* (transparansi)

Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

c. *Accountability* (akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (*effective oversight*) berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris dan auditor. Merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen pada perusahaan dan para pemegang saham.

d. *Responsibility* (responsibilitas)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang



kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Sedangkan menurut KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 dirumuskan oleh OECD (Tjager, 2003:53), prinsip-prinsip *good corporate governance*, yaitu :

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
2. **Kemandirian**, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. **Akuntabilitas** yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **5. Pilar-pilar *Good Corporate Governance***

Konsep *good governance* adalah seluruh rangkaian proses pembuatan yang mensinergikan pencapaian tujuan tiga pilar *good governance*, yaitu

pemerintah sebagai *good public governance*, masyarakat dan dunia usaha swasta sebagai *good corporate governance*. Tiga pilar *good governance* adalah pertama, pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan. Selanjutnya pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan.

Kedua, swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan saha sektor non pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama penerimaan pemerintah dan daerah. Ketiga, masyarakat berperan sebagai pemeran utama (bukan berpartisipasi) dalam proses pembangunan, perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsinya, serta perlunya pemberdayaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produksinya.

## 6. Lingkup *Good Corporate Governance*

*The Organization for Economic and Development* atau biasa disingkat dengan OCED memberikan pedoman mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar tercipta *good governance* dalam suatu perusahaan (Sutedi dalam Tadikapury, 2011:12), yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.



2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of stakeholders*).
3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of stakeholders*).
4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*).
5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (*the responsibilities of the board*).

### C. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Hubungan antara CSR perusahaan dengan *sustainable development* terkait dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya berdasar pada profit atau keuntungan yang nantinya akan diperoleh perusahaan semata. Tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan social. Adanya CSR yang dijalankan oleh perusahaan adalah sebagai salah satu tujuan untuk mewujudkan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

#### 1. Definisi Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah karena perhatian kepada lingkungan. Terutama pada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui yang terus tereksploitasi. Pengertian dari tidak mengurangi dan mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang adalah pembangunan yang dilakukan dimasa sekarang itu jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap sumber daya alam dan juga memperhatikan generasi yang akan datang.

Pendapat Friedman yang dikutip oleh Agus Suryono (2010:20-21) mengemukakan bahwa ide dasar dari konsep *sustainable development* bermula



dari “*The Club of Rome*” pada tahun 1972, yakni sekelompok orang yang terdiri dari para manajer para ahli ilmu teknik dan ilmuwan se-Eropa yang berhasil menyusun suatu dokumen penting mengenai keprihatinan terhadap lingkungan yang disebutnya sebagai “*the limits to growth*”. Pesan penting dari dokumen tersebut diantaranya bahwa sumber daya alam telah berada pada suatu tingkat ketersediaan yang memprihatinkan dalam menunjang keberlanjutan (*sustainability*) pertumbuhan penduduk dan ekonomi.

Definisi lain *sustainable development* yang terkenal adalah dari Burtland Report (*World Commission on Environment and Development*, 1987) yaitu : “*Sustainable development is development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan memberikan kesempatan yang sama bagi generasi mendatang untuk mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada definisi yang dikemukakan oleh WCED ini setidaknya terdapat dua hal domain yaitu menyangkut pembangunan jangka panjang serta pembangunan yang dapat di manfaatkan oleh generasi yang akan datang akan kesempatan yang sama dalam memenuhi kebutuhan.

Budimanta (2005) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam proses

pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang semuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sutamihardja (2004:43) menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya :

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumberdaya yang *unreplaceable*.
- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Jadi secara definisi, pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu pembangunan yang tidak hanya mengacu pada ekosistem dalam lingkungan melainkan juga diarahkan pada tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya pembangunan berkelanjutan ini diharapkan mampu meningkatkan



kualitas hidup lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

## **2. Pembangunan Berkelanjutan Bidang Lingkungan**

Surna T. Djajadiningrat (2005:123) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka panjang. Lebih lanjut secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pencapaian keberlanjutan dalam hal ekologis, ekonomis, sosial budaya, politik, dan keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan ekologis merupakan prasyarat pembangunan demi keberlanjutan kehidupan karena akan menjamin keberlanjutan eksistensi bumi.

Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumber daya alam, serta kemampuan biosfer dalam menyerap berbagai pengaruh aktivitas manusia. Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut dan didukung sumber alam yang ada dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakin berkembang dalam batas daya dukung lingkungannya (Sugandhy dan Rustam, 2009:22).

Pada hakekatnya, pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan aktivitas yang memanfaatkan seluruh sumber daya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan juga berupaya untuk memelihara keseimbangan antara lingkungan dan manusia sehingga keduanya tetap dalam keserasian dan seimbang. Prinsip pemeliharaan dan pelestarian lingkungan itulah



yang seharusnya menjadi dasar dari setiap pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan menjaga keberlanjutan fungsi alam.

Pembangunan dan lingkungan hidup adalah dua bagian yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Sesuai dengan pendapat Soemarwoto (1989:146) yang mengatakan bahwa :

“Pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem. Oleh karena itu, tidak akan terjadi sebuah pembangunan dalam kehidupan manusia jika tidak ada lingkungan yang mendukung kearah terwujudnya pembangunan tersebut”.

Pembangunan bertujuan untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatkan permintaan atas sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam (Soemarwoto, 1989:146). Lebih lanjut pendapat Emil Salim (1992:3) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam sumber daya manusia, dengan menyeraskan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembangunan yang tetap menjaga keseimbangan antara ekosistem dengan manusia supaya sumberdaya alam tersebut tetap bisa di manfaatkan untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Terpeliharanya

keberlanjutan lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran serta anggota masyarakat, yang dapat di salurkan melalui perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup mendukung yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Faktor lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan ialah: terpeliharanya proses ekologi yang esensial, tersedianya sumber daya alam yang cukup, serta lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang sesuai (Soemarwoto, 1989:149).

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan CSR. Karena sesuai dengan konsep, prinsip, dimensi CSR yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan CSR sendiri adalah mencapai *sustainability* (keberlanjutan) yang mencakup tiga aspek yaitu, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dimana tiga aspek tersebut juga merupakan indikator yang terdapat dalam pembangunan berkelanjutan. Jika dalam CSR di kenal dengan 3 poin penting dengan istilah *triple bottom line* yang meliputi *profit, planet, people*. Konsep 3P dianggap sebagai pilar utama dalam membangun bisnis yang berkelanjutan.

#### 1. Profit (*economy*)

Perusahaan melakukan bisnis baik skala kecil ataupun skala besar mempunyai tujuan sama yakni mencari keuntungan / profit. Bisnis yang berlanjut adalah bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan secara terus menerus, tiada henti. Untuk menghasilkan keuntungan yang berlanjut, tentunya kita harus

mempunyai strategi-strategi bisnis yang tepat baik dari segi teknologi , produksi , pemasaran dan segi-segi lainnya.

## 2. Planet (*environment*)

Memanfaatkan lingkungan di planet bumi ini dalam kegiatan operasional perusahaan kita seperti penggunaan air, listrik, bahan bakar , kertas , dan lainnya. Andaikan, lingkungan hidup kita rusak , pastinya kita akan kesulitan / tidak akan bisa menjalankan operasional dengan baik. Air , tanah dan udara yang tercemar akan menghentikan bisnis perusahaan kita, tidak akan berlanjut. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan lingkungan sehingga kelestariannya dapat terjaga. Paling tidak dampak negatif yang dihasilkan dari operasional perusahaan dapat diminimalkan.

## 3. People (*society*)

Manusia merupakan faktor penting dalam bisnis berkelanjutan. Kita harus memperhatikan mereka. Manusia disini bisa dari karyawan ataupun masyarakat yang ada di sekitar perusahaan kita. Untuk karyawan, kita harus memperhatikan tingkat kesejahteraan mereka, keselamatan dan kesehatan mereka. Coba kalau karyawan yang ahli banyak yang keluar (*resign*), akan bermasalah dalam operasional kita. Ingat membentuk tenaga ahli bukan perkara mudah dan singkat ataupun karyawan yang banyak mengalami kecelakaan kerja betapa besar biaya dan konsekuensi yang harus ditanggung perusahaan.

Untuk masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan, kita juga harus perhatikan. Mungkin ada sebagian masyarakat, yang mendapatkan dampak positif dengan kehadiran perusahaan kita. Namun, ada juga masyarakat yang



mendapatkan dampak negatif dari keberadaan perusahaan. Kita harus memperhatikan mereka, pemberdayaan masyarakat (*Community Development*) itu penting, kalau bisa membantu mereka untuk dapat meningkat pendapatan / taraf hidupnya.

Dahulu, banyak perusahaan hanya memperhatikan PROFIT-nya saja. Namun, dengan realita yang ada dimana planet bumi kita makin rusak, para karyawan dapat dengan mudah berdemo, masyarakat makin mudah marah, sering terjadi konflik dengan perusahaan. Banyak perusahaan makin menyadari bahwa mereka juga harus memperhatikan masalah PLANET dan PEOPLE. Sekarang, banyak perusahaan yang mulai menjalankan konsep keberlanjutan – 3P dengan mengadakan program CSR (*Corporate Social Responsibility*), penerapan sistem manajemen lingkungan (ISO 14001), OHSAS / Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), RSPO (*Roundtable on Sustainability Palm Oil*). Maka dalam pembangunan berkelanjutan juga terdapat dimensi di dalamnya yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada dasarnya, CSR merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *sustainability*.

Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.

Komitmen untuk mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara konsisten.

Kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keberlanjutannya merupakan tugas bersama dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan bertumpu pada kerjasama antar aktor yang terlibat. Upaya untuk memperluas jangkauan dan kesadaran lingkungan hidup perlu terus ditumbuhkan agar dapat mengikat komitmen semua pihak yang terkait guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Askar Jaya (2004) menegaskan bahwa untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan di bumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara dan seluruh kehidupan berkelanjutan.
2. Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan yaitu; daya dukung, daya asimilatif, dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya dipulihkan. Ketiga untuk melaksanakan kegiatan yang tidak mengalir; menggunakan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan, sedangkan sumber yang tidak terpulihkan mempunyai jumlah absolut dan berkurang bila dimanfaatkan.

Secara ideal, pembangunan berkelanjutan membutuhkan pencapaian keberlanjutan ekologis, yakni akan menjamin eksistensi bumi. Hal-hal yang perlu diupayakan antara lain :

1. Memelihara (mempertahankan) integrasi tatanan lingkungan, dan keanekaragaman hayati;
2. Memelihara integrasi tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan bumi ini tetap terjamin;
3. Memelihara keanekaragaman hayati, meliputi aspek keanekaragaman genetika, keanekaragaman spesies dan keanekaragaman tatanan lingkungan.



#### D. Corporate Social Responsibility (CSR)

##### 1. Pengertian Corporate Social Responsibility

CSR dapat dipecah dalam berbagai kegiatan lain yang disebut proyek. Proyek merupakan aktivitas tertentu yang ditentukan waktunya, lokasinya dan tujuannya atau maksudnya (anggarannya). Proyek menjelaskan suatu program yang dijabarkan secara terperinci pada sasaran tujuan. Proyek menjelaskan suatu program yang lebih sempit dari program, dan dikerjakan dalam jangka waktu yang terbatas.

*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab social perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan (Suhandari dalam Hendrik, 2008:1). CSR adalah salah satu program yang turun dari kebijakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Berawal dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi ‘...Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan...’.

Menurut Widjaja dan Yeremia (2008) yang dikutip dalam Marnelly (2012:51) menyatakan bahwa:

“*Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (*stake holders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut”.



Maka dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholders* dalam arti luas dari pada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak yang terkait. Sehingga setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap *stakeholders*-nya dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas usahanya (Sonny dalam Isa, 2008:43-44).

## **2. Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility***

Adanya prinsip-prinsip CSR diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan CSR itu sendiri. Salah seorang pakar *Corporate Social Responsibility* dari University of Bath Inggris yaitu Alyson Warhurst (1998) yang dikutip oleh Wahyudi dan Azheri (2008:57-60) menjelaskan ada 16 prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Prioritas Korporat**

Mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu korporat bisa membuat kebijakan, program dan praktek dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.

b. Manajemen Terpadu

Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktek ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai suatu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen.

c. Proses Perbaikan

Secara bersinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasar temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan criteria sosial tersebut secara internasional.

d. Pendidikan Karyawan

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan.

e. Pengkajian

Melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik.

f. Produk dan Jasa

Mengembangkan produk dan jasa yang tak berdampak negative secara sosial.

g. Informasi Publik

Memberi informasi dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor dan public tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan dan pembuangan produk, dan begitu pula dengan jasa.

h. Fasilitas dan Operasi

Mengembangkan, merancang dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial.

i. Penelitian

Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif.

j. Prinsip Pencegahan

Memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk atau jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir, untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negative.

k. Kontraktor dan Pemasok

Mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial korporat yang dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok, disamping itu bila diperlukan mensyaratkan perbaikan dalam praktik bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok.

l. Siaga Menghadapi Darurat

Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan berbahaya bekerjasama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitas local. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul.

m. *Transfer best practice*

Berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industry dan sektor publik.



n. Memberi Sumbangan

Sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.

o. Keterbukaan

Menumbuhkembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respon terhadap potensial hazard, dan dampak operasi, produk, limbah atau jasa.

p. Pencapaian dan Pelaporan

Mengevaluasi kinerja sosial, melakukan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan criteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi pemegang saham, pekerja dan publik.

### 3. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Menurut Untung (2009:6-7) terdapat manfaat *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan yaitu sebagai berikut :

- a. Mempertahankan serta mendongkrak reputasi serta citra merk perusahaan
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
- g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders

- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
- j. Peluang mendapatkan pekerjaan

Sedangkan Gurvey Kavei yang dikutip dalam Wahyudi (2008:124-125), menegaskan bahwa setiap perusahaan yang mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* dalam aktivitas usahanya akan mendapatkan 5 (lima) manfaat utama yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan profitabilitas dan kinerja financial yang lebih kokoh, misalnya lewat efisiensi lingkungan.
2. Meningkatkan akuntabilitas, assessment, dan komunitas investasi.
3. Mendorong komitmen karyawan, karena mereka diperhatikan dan dihargai.
4. Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas.
5. Mempertinggi reputasi dan corporate branding.

#### **4. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility***

Menurut Jack Mahoney yang dikutip dalam Wahyudi (2008:47-50), ruang lingkup *Corporate Social Responsibility* dapat dibedakan menjadi 4 (empat) sebagai berikut :

1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas.

Perusahaan diharapkan tidak hanya melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan, melainkan juga ikut memikirkan kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dengan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya pembangunan rumah ibadah, membangun sarana dan prasarana fasilitas umum, penghijauan, pemberian beasiswa, dan pelatihan.



## 2. Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan.

Keuntungan ekonomi dilihat sebagai sebuah tanggung jawab moral dan sosial yang sah dari suatu perusahaan. Keterlibatan aktivitas sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan sangat menunjang kegiatan bisnis dan pada akhirnya menguntungkan perusahaan itu sendiri.

## 3. Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun kegiatan sosial masyarakat pada umumnya.

Perusahaan adalah bagian masyarakat yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keteraturan tatanan sosial. Dengan kata lain, perusahaan dan masyarakat sebagai subyek hukum yang sama-sama sebagai pengemban hak dan kewajiban. Jika perusahaan tidak mematuhi aturan hukum yang ada, maka ketertiban dan keteraturan masyarakat tidak akan terwujud.

## 4. Menghormati hak dan kepentingan stakeholders atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas perusahaan.

Perusahaan dituntut dan menuntut dirinya sendiri untuk bertanggung jawab atas hak dan kepentingan *stakeholders*. Tanggung jawab sosial perusahaan akan menjadi hal yang konkret, baik demi terciptanya suatu kehidupan sosial yang baik, maupun demi keberlanjutan dan keberhasilan aktivitas perusahaan itu sendiri.

## 5. Model atau Pola *Corporate Social Responsibility*

Menurut Saidi dan Abidin (2004) yang dikutip dalam Marnelly (2012:51), terdapat empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia sebagai berikut :

### a. Keterlibatan langsung

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya



menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.

b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.

c. Bermitra dengan pihak lain

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas, atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat "hibah pembangunan". Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Sedangkan menurut Anne (2005) yang dikutip dalam Marnelly (2012:52), "pola *Corporate Social Responsibility* juga berkembang dari bentuk *charity*

*principle* kepada *stewardship principle*.” Adapun pola CSR tersebut sebagai berikut :

#### 1. *Charity principle*

Kalangan masyarakat mampu memiliki kewajiban moral untuk memberikan bantuan kepada kalangan kurang mampu. Jenis bantuan perusahaan ini sangat diperlukan dan penting khususnya pada masa atau sistem negara dimana tidak terdapat sistem jaminan sosial, jaminan kesehatan bagi orangtua, dan tunjangan bagi penganggur.

#### 2. *Stewardship principle*

Korporasi diposisikan sebagai public trust karena menguasai sumber daya besar dimana penggunaannya akan berdampak secara fundamental bagi masyarakat. Oleh karenanya perusahaan dikenakan tanggungjawab untuk menggunakan sumber daya tersebut dengan cara-cara yang baik dan tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham tetapi juga untuk masyarakat secara umum.

### 6. **Bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility***

Dalam implementasinya, bentuk dari *Corporate Social Responsibility* atau biasa disingkat dengan CSR dapat digolongkan menjadi empat (Wahyudi, 2008:62-63) yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan lingkungan kerja secara baik, termasuk didalamnya penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya.
2. Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat local. Kemitraan ini diwujudkan secara umum dalam program *community*

*development* untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui program ini diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan perusahaan yang digunakan untuk menopang kemandiriannya bahkan setelah perusahaan berhenti beroperasi.

3. Penanganan kelestarian lingkungan, kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas, dan sebagainya sampai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan, agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor, pabrik, atau lahan.
4. Investasi sosial yang sering diartikan secara sempit sebagai “kegiatan amal perusahaan”. Makna sesungguhnya adalah perusahaan member dukungan financial dan non-finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh sekelompok/organisasi lain yang akhirnya menunjang kegiatan bisnis perusahaan, karena perusahaan melalui investasi sosial akan menuai citra positif.

## **7. Keuntungan CSR bagi perusahaan**

1. Layak Mendapatkan sosial *licence to operate*

Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan yang diberika kepada perusahaan adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut.



## 2. Mereduksi Resiko Bisnis Perusahaan

Mengelola resiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Disharmoni dengan *stakeholders* akan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka biaya untuk recovery akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan program *Corporate Social Responsibility*. Oleh karena itu, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan dengan *stakeholders* perlu mendapat perhatian.

## 3. Melebarkan Akses Sumber Daya

Track records yang baik dalam pengelolaan *Corporate Social Responsibility* merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.

## 4. Membentangkan Akses Menuju Market

Investasi yang ditanamkan untuk program *Corporate Social Responsibility* ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.

## 5. Mereduksi Biaya

Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan melakukan *Corporate Social Responsibility*. Misalnya: dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat menghemat biaya produksi,

juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan.

#### 6. Memperbaiki Hubungan dengan *Stakeholder*

Implementasi *Corporate Social Responsibility* akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholder*, dimana komunikasi ini akan semakin menambah *trust stakeholders* kepada perusahaan.

#### 7. Memperbaiki Hubungan dengan Regulator

Perusahaan yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility* umumnya akan meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

#### 8. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan

Image perusahaan yang baik di mata *stakeholders* dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan, akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka.

#### 9. Peluang Mendapatkan Penghargaan

Banyaknya penghargaan atau reward yang diberikan kepada pelaku *Corporate Social Responsibility* sekarang, akan menambah kans bagi perusahaan untuk mendapatkan award.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir yang dipersiapkan untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan fakta-fakta tentang manusia, alam dan hubungan satu dengan yang lain guna memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan adanya metode penelitian, penelitian yang dilakukan dapat menjadi lebih fokus dan terarah.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan mencari jawaban atas suatu masalah secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan pokok-pokok perumusan masalah yang akan diteliti agar dapat memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. Penggolongan jenis penelitian akan sangat bergantung dari sudut mana suatu penelitian itu akan ditinjau. Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2001:6) “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain”. Bogdan dan Taylor dalam Moleong



(2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan kata lain pendekatan kualitatif yang dilakukan merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk menggambarkan kejadian baik secara tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati pada saat penelitian dilakukan untuk kemudian di analisis dan diinterpretasikan.

Dari beberapa pendapat diatas, berdasarkan pada permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu yang akan diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan penggambaran terhadap suatu fenomena yang akan diteliti secara sistematis dan lebih mendalam dengan mengolah data-data yang didapat dilapangan.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sangat berkaitan dengan masalah data yang akan dikumpulkan, diolah dan kemudian dianalisis. Fokus ini sangat penting bertujuan untuk menentukan batas penelitian yang akan dilakukan sehingga memperjelas dan mempertajam bahasan. Disamping itu, penentuan fokus berguna untuk membantu peneliti dalam menyaring informasi yang masuk atau berkaitan dengan data-data yang dianggap relevan.

Menurut Moleong (2007:28), fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi bagi seorang peneliti dan menentukansasaran penelitian sehingga

dapat mengklasifikasikan data yang akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dalam suatu penelitian. Sedangkan tujuan dari pengambilan fokus penelitian adalah:

1. Untuk membatasi studi, Misalnya jika kita membatasi diri dari upaya menemukan teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak diperlukan lagi.
2. Untuk memenuhi kriteria masukkan dan mengeluarkan informasi dari lapangan.

Sehingga dengan menetapkan fokus yang jelas, peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat tentang data yang akan digunakan dan yang tidak digunakan.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan, yaitu terdiri dari:
  - a) Aktor yang terlibat
  - b) Bentuk kegiatan
  - c) Dukungan SDM dan biaya
  - d) Tujuan (capaian)
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan, yaitu meliputi :
  - a) Masalah penanganan sampah
  - b) Kapasitas mesin pengelolaan sampah yang terbatas
  - c) Masih belum adanya Peraturan Pemerintah Daerah tentang pengelolaan sampah Kabupaten Gresik

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan, sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana penelitian menangkap kegiatan sebenarnya dari objek yang diteliti, guna mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk mengetahui fenomena yang secara praktis sesuai kenyataan yang ada. Hal ini karena lokasi penelitian yang memang menarik minat peneliti dikarenakan implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan berada di Desa Ngipik, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga akan mendapatkan informasi dan data-data yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu di Semen Indonesia Foundation (SMIF), yang terletak di Jalan Awikoen B-1, Gresik 61112

Alasan memilih lokasi dan situs penelitian di *Waste To Zero* yang berlokasi di Desa Ngipik, ialah berdasarkan pada pertimbangan :

1. Keberadaan *waste to zero* yang menuai prestasi sebagai tempat pengelolaan sampah percontohan di Indonesia atau Mancanegara melalui penerapan program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup. Kunci keberhasilan *waste to zero* dalam mencapai prestasi tersebut tentunya terletak pada bagaimana manajemen yang dilakukan oleh Semen Indonesia Foundation (SMIF) sebagai yayasan yang berperan sebagai pengelola *waste to zero*.



2. Semen Indonesia Foundation (SMIF) yang berperan sebagai pembina seluruh tempat pengelolaan sampah yang lokasinya tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Gresik. Adapun tugas Semen Indonesia Foundation (SMIF) yaitu melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam pengelolaan sampah, menjadi lembaga konsultan, hingga memantau kinerja *waste to zero* berupa adanya laporan kinerja yang diserahkan kepada Ketua Pengurus setiap bulan, triwulan, dan tahunan.

#### **D. Jenis Data dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Data adalah bahan atau keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta yang berkaitan dengan tujuan penelitian dan memberikan keterangan yang dapat berupa catatan dalam bentuk buku atau file (Idrus, 2007:37). Sedangkan sumber data merupakan sumber penyedia informasi yang akan menjadi fokus penelitian Moleong (2010:157). Sumber data utama dalam sebuah penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan melalui wawancara, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Adapun sumber data menurut Idrus (2007:38) yang di dasarkan pada derajat sumbernya dapat dibagi menjadi :

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut.

Primer atau sekundernya sumber data tergantung pada maksud penelitian. Sumber primer dapat diperoleh dari peneliti sendiri. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Semen Indonesia Foundation (SMIF) Kabupaten Gresik, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan fenomena yang akan diteliti yaitu masalah implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Gresik.

## 2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah :

### a. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak Sumarno selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kota Gresik.
2. Bapak Soesetyoko selaku Ketua Pengurus Semen Indonesia Foundation (SMIF).
3. Bapak Hari Sugiantono selaku Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan Semen Indonesia Foundation (SMIF).
4. Bapak Yusuf Efendi selaku Manajer Divisi Pengelolaan Lingkungan Semen Indonesia Foundation (SMIF).
5. Bapak Heru selaku Petugas Retribusi Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik.

### b. Peristiwa

Disamping keterangan dari informasi tersebut, peneliti mendapatkan data atau informasi yang bersumber dari peristiwa atau fenomena yang dianggap sesuai

dan bermanfaat untuk mengungkap permasalahan-permasalahan atau fokus penelitian. Peristiwa yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Semen Indonesia Foundation (SMIF) terkait implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Gresik.

#### c. Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan telah dikumpulkan oleh pihak lain atau telah diolah atau bisa disebut dengan jenis data sekunder. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi, mendukung dan memperkaya data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Misalnya pengumpulan yang didapat dari buku, dokumen/catatan resmi, beberapa artikel yang diakses melalui internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang di dapat :

1. PPT Program *waste to zero*
2. Amdal proses pembuatan program *waste to zero*
3. Proposal Program *waste to zero*
4. Struktur Organisasi Divisi Pengelolaan Lingkungan Semen Indonesia Foundation
5. Uraian tugas pokok tenaga kerja *waste to zero*

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazir (2011:174), pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang



ingin dipecahkan. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung dengan informan maupun pihak-pihak yang terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau data secara lebih jelas dan mendalam.

2. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki langsung di lapangan, dengan mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah dokumen, arsip dan catatan instansi yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mencari data. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama (Moleong, 2007:135). Adapun Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dipakai dalam membahas masalah penelitian, yaitu:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan cara menyaksikan dan mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan focus penelitian, sehingga

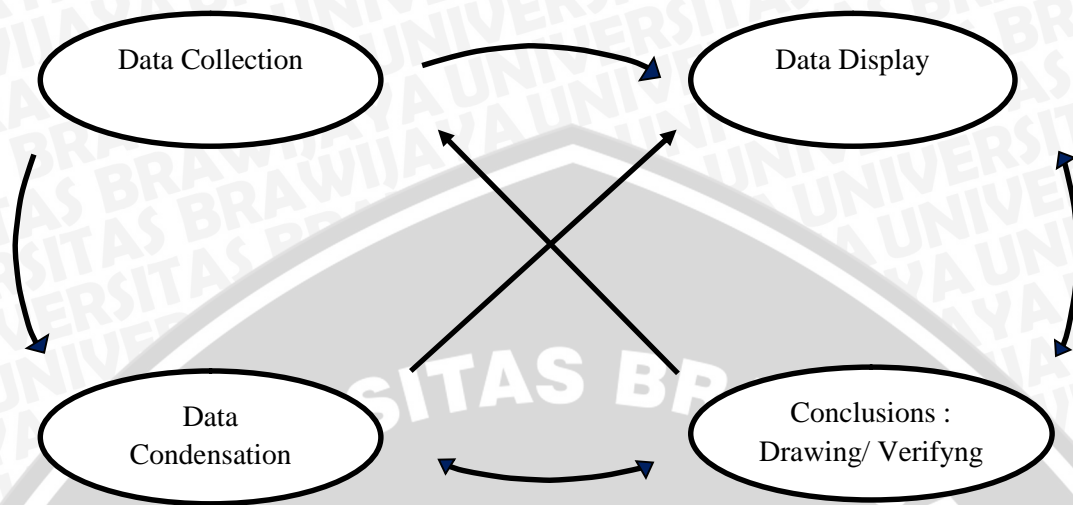
didapatkan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti secara representative yang berguna sebagai bahan analisa.

2. Pedoman wawancara atau interview guide, digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan wawancara agar wawancara yang dilakukan peneliti tetap terarah dan tetap menjaga relevansi terhadap masalah dalam penelitian.
3. Perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis menulis, dan alat bantu lain untuk merekam serta mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian.
4. Situs penelitian, merupakan alat peneliti untuk memperoleh segala informasi atau data yang menunjang dengan penelitian.

#### **G. Analisis Data**

Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis diamati dengan mempelajari seluruh data dari berbagai sumber setelah itu mengadakan reduksi data dengan membuat rangkuman inti, langkah selanjutnya menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan dalam satu kelompok yang sama, kemudian pemeriksaan keabsahan data dan tahap yang terakhir disimpulkan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 komponen. Alur kegiatan analisa kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) meliputi:



**Gambar 2 : Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif**

*Sumber: Analisis Miles Huberman dan Saldana 2014:14*

1. Koleksi Data (*Data Collection*)

Koleksi data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi dengan narasumber-narasumber yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah pengelolaan data, sehingga akan memberatkan perubahan wujud dari bentuk laporan- laporan sampai data tersebut siap disajikan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, sehingga disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian data merupakan informasi yang tersusun yang memungkinkan



penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data dimaksudkan agar mempermudah bagi penelitian melihat gambaran secara keseluruhan atau biasa dikatakan menyederhanakan informasi dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami

#### 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Verifikasi yaitu peneliti berusaha menggambarkan dari data yang dikumpulkan dan dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara. Verifikasi merupakan suatu rangkaian saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti dari data yang telah diolah kemudian di sajikan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan uraian diatas dalam penyajian data, masalah reduksi, penyajian dan verifikasi data merupakan gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian analisis sehingga dalam penulisan skripsi dapat lebih terarah. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan fokus dan rumusan yang diangkat peneliti untuk dapat dituangkan kedalam penyajian data.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Gresik

###### a. Sejarah Kabupaten Gresik

Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan tidak saja antar pulau tetapi sudah meluas keberbagai negara. Sebagai Kota Bandar Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Campa dan lain-lain. Gresik mulai tampil menonjol dalam peraturan sejarah sejak berkembangnya agama islam di tanah jawa. Pembawa dan penyebar agama islam tersebut tidak lain adalah Syech Maulana Malik Ibrahim yang bersama-sama Fatimah Binti Maimun masuk ke Gresik pada awal abad ke-11. Sejak lahir dan berkembangnya Kabupaten Gresik selain berawal dari masuknya agama islam yang kemudian menyebar ke seluruh pulau jawa tidak terlepas dari nama Nyai Ageng Pinatih dari janda kaya raya yang juga seorang syahbandar. Inilah nantinya akan ditemukan nama seseorang yang kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya kota gresik. Dia adalah seorang bayi asal Blambangan Kabupaten Banyuwangi yang dibuang ke laut oleh orang tuanya dan ditemukan oleh para pelaut anak buah Nyai Ageng Pinatih yang kemudian diberi nama Jaka Samudra.

Setelah perjaka bergelar raden paku yang kemudian menjadi penguasa pemerintah yang berpusat di Giri Kedato, Dari tempat itu beliau kemudian dikenal dengan panggilan Sunan Giri. Kalau Syeh Maulana Malik Ibrahim pada jamannya dianggap sebagai para penguasa, tiang para raja dan menteri. Maka sunan giri disamping kedudukannya sebagai seorang sunan atau wali (Penyebear Agama Islam) juga dianggap sebagai Sultan / Prabu (Penguasa Pemerintahan) Sunan Giri dikenal menjadi salah satu tokoh wali songo ini juga dikenal dengan prabu Satmoto atau Sultan Ainul Yaqin. Tahun dimana beliau dinobatkan sebagai pengusaha pemerintahan (1487 M) akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya Kabupaten Gresik. Beliau memerintah Gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai kurang lebih 200 tahun menjabat sebagai bupati yang pertama adalah Kyai Ngabehi Tumenggung Poesponegoro pada tahun 1617 saka yang jasadnya dimakamkan di komplek makam Poesponegoro di jalan pahlawan Gresik satu komplek dengan makam Syech Maulana Malik Ibrahim.

Kabupaten Gresik terkenal sebagai kota wali hal ini ditandai dengan penggalian sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya di Kabupaten Gresik yaitu Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Disamping itu Kabupaten Gresik juga bisa disebut dengan Kota Santri karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami yaitu Madrasah Ibtida'iyah, Tsanawiyah dan Aliyah hingga Perguruan Tinggi yang cukup banyak di kota ini. Hasil Kerajinan yang bernuansa Islam juga dihasilkan oleh masyarakat Kota Gresik, misalnya kopyah, sarung, mukenah, sorban dan lain-lain.



Semula kabupaten ini bernama Kabupaten Surabaya. Memasuki dilaksanakannya PP Nomer 38 Tahun 1974. Seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke Gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan pusat kegiatan di Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik yang merupakan sub wilayah pengembangan bagian (SWPB) tidak terlepas dari kegiatan sub wilayah pengembangan Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Wilayah pengembangan diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritime, pendidikan dan industri wisata. Dengan ditetapkannya Gresik sebagai bagian salah satu wilayah pengembangan Grebang kertosusila dan juga sabagai wilayah industri. Maka Kabupaten Gresik menjadi lebih terkenal dan termashur tidak saja di nusantara tetapi juga ke seluruh dunia yang ditandai dengan munculnya industri-industri.

#### **b. Keadaan Geografis**

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Gresik sebesar 1.191,25 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut. Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari

Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, dan Kecamatan Ujungpangkah. Sedangkan kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak lokasinya berada di Pulau Bawean. Kabupaten Gresik juga berdekatan dengan kabupaten/kota yang tergabung dalam Gerbang-kertasusila, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan.

Secara administratif daerah Kabupaten Gresik berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara : Laut Jawa
- 2) Sebelah Timur : Selat Madura
- 3) Sebelah selatan : Kabupaten Sidoarjo  
Kabupaten Mojokerto  
Kota Surabaya
- 4) Sebelah barat : Kabupaten Lamongan.

Berikut ini adalah peta wilayah Kabupaten Gresik yang menggambarkan letak batas-batas wilayah Kabupaten Gresik yang telah dijelaskan diatas. Selain itu juga menggambarkan letak semua kecamatan yang tercakup pada wilayah Kabupaten Gresik.





**Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Gresik**

*Sumber : Kabupaten Gresik dalam angka, 2015*

### c. Kondisi Penduduk

Tahun 2013 kondisi penduduk Kabupaten Gresik sebesar 1.324.777 yang terdiri dari 667.568 laki laki dan 657.209 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Gresik sebesar 1.191,25/Km<sup>2</sup> maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gresik adalah 1.112 jiwa/Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.



Sedangkan Dari hasil registrasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada Tahun 2014 meningkat sebesar 1.319.314 jiwa, yang terdiri dari 664.288 jiwa penduduk laki-laki dan 655.026 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut berada pada 370.363 keluarga. Dengan luas wilayah 1.191,25 km<sup>2</sup> Kabupaten Gresik mempunyai kepadatan penduduk sebesar 1.108 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara total pada Tahun 2014 penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin pada tahun 2014 Kabupaten Gresik mempunyai angka rasio jenis kelamin sebesar 101. Ini berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2014 dilihat pada tabel 3.

**Tabel 1. Luas wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Keluarga, Kepadatan, dan Rata-rata per keluarga Tahun 2013**

Kecamatan	2013				
	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Penduduk	Keluarga	Kepadatan	Rata-rata per keluarga
Wringinanom	62,62	72 589	22 013	1 159	3
Driyorejo	51,30	103 731	29 220	2 022	4
Kedamean	65,96	62 255	18 692	944	3
Menganti	68,71	120 880	34 148	1 759	4
Cerme	71,73	78 968	21 054	1 101	4
Benjeng	61,26	66 698	19 231	1 089	3
Balongpanggung	63,88	59 700	17 494	935	3
Duduksampeyan	74,29	51 835	13 997	698	4
Kebomas	30,06	102 851	27 755	3 422	4

Gresik	5,54	93 335	25 449	16 847	4
Manyar	95,42	110 165	29 187	1 155	4
Bungah	79,49	67 123	17 900	844	4
Sidayu	47,13	43 444	11 216	922	4
Dukun	59,03	68 954	18 790	1 168	4
Panceng	62,59	52 437	13 955	838	4
Ujungpangkah	94,82	50 971	13 751	538	4
Sangkapura	118,72	76 741	19 593	646	4
Tambak	78,70	42 100	10 659	535	4
<b>Gresik</b>	<b>1 191,25</b>	<b>1 324 777</b>	<b>364 104</b>	<b>1 112</b>	<b>4</b>

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Gresik, 2013

**Tabel 2. Luas wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Keluarga, Kepadatan, dan Rata-rata per keluarga Tahun 2014**

Kecamatan	2014				
	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Penduduk	Keluarga	Kepadatan	Rata-rata per keluarga
Wringinanom	62,62	72 173	22 415	1 153	3
Driyorejo	51,30	103 623	29 796	1 655	5
Kedamean	65,96	62 566	19 077	999	3
Menganti	68,71	121 266	34 862	1 937	5
Cerme	71,73	78 920	21 460	1 260	4
Benjeng	61,26	66 241	19 384	1 058	3
Balongpanggung	63,88	58 990	17 596	942	3
Duduksampeyan	74,29	51 546	14 171	823	2
Kebomas	30,06	103 655	28 603	1 655	5
Gresik	5,54	91 124	25 578	1 455	4
Manyar	95,42	111 041	29 958	1 773	5

Bungah	79,49	67 427	18 348	1 077	3
Sidayu	47,13	43 757	11 476	699	2
Dukun	59,03	68 705	19 077	1 097	3
Panceng	62,59	52 552	14 250	839	2
Ujungpangkah	94,82	51 066	13 987	815	2
Sangkapura	118,72	73 690	19 643	1 177	3
Tambak	78,70	40 973	10 682	654	2
<b>Gresik</b>	<b>1 191,25</b>	<b>1 319 314</b>	<b>370 363</b>	<b>1 108</b>	<b>4</b>

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka, 2015.

#### d. Visi dan Misi Kabupaten Gresik

Visi Kabupaten Gresik yaitu Gresik Yang Agamis, Adil, Makmur Dan Berkehidupan Yang Berkualitas. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) Gresik adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.
- 2) Agamis adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah hubungan antar manusia dan lingkungannya.
- 3) Adil adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.
- 4) Makmur adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya.



- 5) Berkehidupan yang berkualitas adalah hidup yang sehat dengan berlatarbelakang pendidikan yang sesuai jaman serta pemenuhan pendapatan yang memadai.

Adapun misi Kabupaten Gresik yaitu sebagai berikut :

- 1) Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri.
- 2) Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- 4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## **2. Gambaran Umum Semen Indonesia Foundation**

### **a. Sejarah Semen Indonesia Foundation**

Dahulunya Semen Indonesia Foundation (SMIF) ini bernama Semen Gresik Foundation (SGF) namun pada tanggal 22 Januari 2015 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-12.AH.01.05.Tahun 2015, tentang persetujuan atas perubahan pasal 1 : (nama) Anggaran Dasar Yayasan : Yayasan Semen Indonesia atau dalam bahasa Inggris disebut Semen Indonesia Foundation disingkat SMIF (NPWP : 02.529.405.9-512.000), sesuai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan,

pendidikan, dan kemanusiaan dalam pelaksanaan pertanggung-jawaban sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dari PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Semen Indonesia Foundation adalah sebuah yayasan yang didirikan dengan tujuan memberikan sumbangsih kepada negeri, khususnya di Kabupaten Gresik dalam sektor lingkungan. Adapun tujuan Semen Gresik Foundation mendirikan *project waste to zero* ini adalah :

1. Mengurangi kebutuhan luasan lahan untuk TPA sampah kota;
2. Mengurangi bahan-bahan pencemar tanah dari sampah ke lingkungan; dan
3. Memanfaatkan sampah kota sebagai bahan bakar industry semen.

Semen Indonesia Foundation (SMIF) selalu berupaya untuk memberikan nilai tambah bagi Pemangku Kepentingan dalam rangka mewujudkan Yayasan yang tepercaya untuk kebanggaan Semen Indonesia Group, nusa dan bangsa.

Untuk itu Pengurus menetapkan Kebijakan Mutu sebagai berikut:

1. Mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menjadikan pengelolaan lingkungan, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya sebagai bagian dari pengelolaan seluruh kegiatan Yayasan
3. Menitikberatkan upaya-upaya untuk meningkatkan layanan produk (barang dan jasa) yang bermutu sesuai harapan pelanggan.

Kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada Pemangku Kepentingan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara konsisten serta dituangkan

dalam Sasaran Mutu dan Program Kerja. Saat ini Semen Indonesia Foundation (SMIF) terletak di Jalan Awikoen B-1, Gresik 61112.

#### **b. Visi dan Misi Semen Indonesia Foundation**

Visi yang ada pada Semen Indonesia Foundation ialah menjadi yayasan mitra terpercaya untuk kebanggaan Semen Indonesia Group dalam menjalankan fungsi pendidikan, sosial, keagamaan dan kemanusiaan dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Sedangkan Misi dari Semen Indonesia Foundation adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan program pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi secara berkelanjutan, dan terintegrasi.
2. Menyelenggarakan program pengelolaan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan industry.
3. Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial, layanan kesehatan, dan layanan psikologi secara professional.
4. Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu untuk menambah citra positif dari Pemangku Kepentingan.

#### **c. Tugas Pokok dan Fungsi Semen Indonesia Foundation**

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Pengurus Semen Indonesia Foundation
  - a) Ketua Pengurus Semen Indonesia Foundation mempunyai tugas sebagai berikut :
    1. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.



2. Mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan dari PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk.
  3. Wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
  4. Wajib dengan itikad baik dan penuh bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Menyampaikan Laporan Keuangan Yayasan Triwulan kepada Pengawas.
  6. Membuat dan menyiapkan portopolio program kerja Yayasan.
  7. Bersama Pengurus yang lain menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- b) Fungsi Ketua Pengurus Semen Indonesia Foundation yaitu sebagai berikut :
1. Berkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan Sekretaris dan Bendahara Pengurus.
  2. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dengan Dinas Pendidikan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).
  3. Mengkoordinasikan kegiatan berbasis lingkungan dan pengelolaan sampah kota dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) di Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur.

4. Berkoordinasi dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Berkaitan dengan asset-aset yang dipergunakan oleh Semen Indonesia Foundation.
5. Berkoordinasi dengan Yayasan di dalam Semen Indonesia Group seperti Yayasan Igarar (Yayasan Ikatan Keluarga Semen Padang) dan YKST (Yayasan Kesejahteraan Semen Tonasa).

## 2) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Pengurus Semen Indonesia Foundation

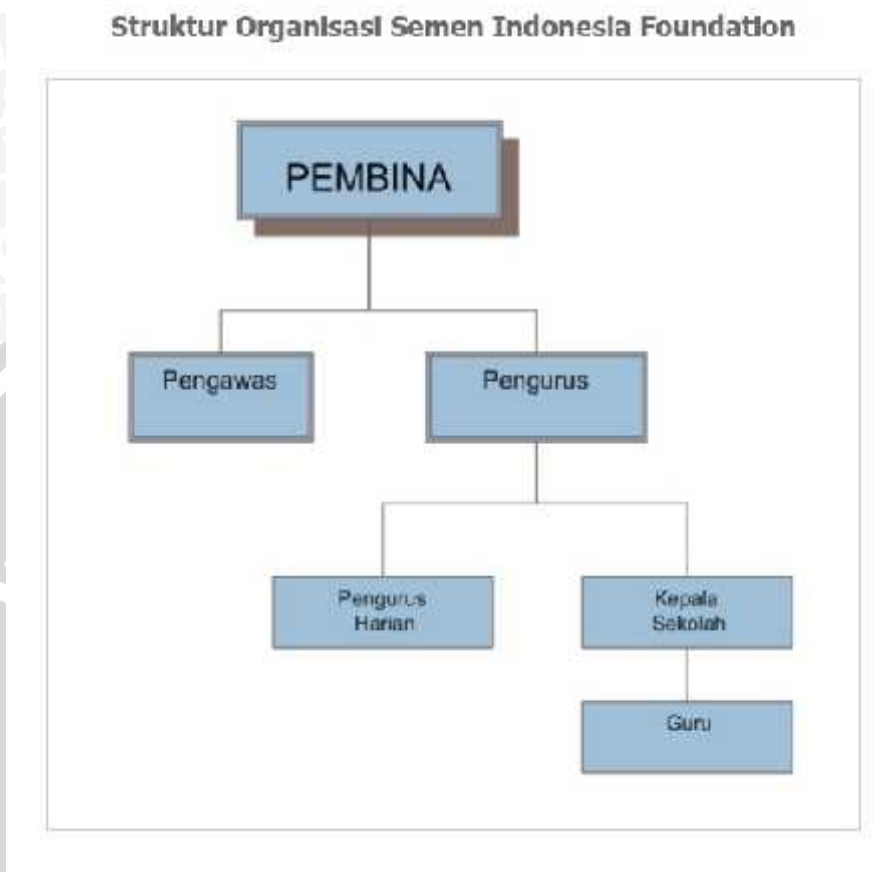
- a) Sekretariat Pengurus Semen Indonesia Foundation mempunyai tugas mengkoordinasikan usulan rekrutmen, pengangkatan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai yayasan, mengelola dan memantau kegiatan perencanaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, menandatangani surat-surat yayasan sesuai wewenang yang diberikan Ketua Pengurus, serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus.
- b) Fungsi Sekretariat Pengurus Semen Indonesia Foundation yaitu sebagai berikut :
  1. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan
  2. Pelayanan administrasi umum, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bidang-bidang
  3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  4. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris yayasan;
  5. Pengkoordinasian pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

## 3) Tugas Pokok dan Fungsi Bendahara Pengurus Semen Indonesia Foundation

- a) Tugas Bendahara Pengurus Semen Indonesia Foundation adalah mengelola administrasi keuangan Yayasan, bersama ketua menandatangani surat-surat Yayasan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana, memantau pelaksanaan kebijakan, standar dan prosedur tata kelola ICT yang sudah ditetapkan, serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus.
- b) Fungsi Bendahara Pengurus Semen Indonesia Foundation yaitu sebagai berikut :
1. Penyusunan anggaran kegiatan kebendaharaan/keuangan, memberikan otorisasi pengeluaran biaya keuangan, dan memeriksa pertanggungjawaban penggunaannya;
  2. Penyusunan laporan keuangan Yayasan yang mencakup posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas
  3. Mengkompilasi laporan pertanggungjawaban keuangan semua bidang menjadi laporan keuangan Pengurus setiap bulan, triwulan dan tahunan.



**d. Struktur Organisasi Semen Indonesia Foundation**



**Gambar 4. Struktur Organisasi Semen Indonesia Foundation**

*Sumber: Semen Indonesia Foundation, 2011*

**Tabel 3. Daftar Nama Pejabat Semen Indonesia Foundation**

No	Jabatan	Nama Pejabat	Profil Pejabat
1	Pembina	Dr. Ir. Dwi Soetjipto, M.M	Menjabat sebagai <u>Direktur Utama PT Pertamina (Persero)</u> sejak 28 Nopember 2014, sebelumnya sebagai <u>Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.</u> (2005-28 Nopember 2014). Beliau mengelola keseluruhan aspek operasional dari Semen Indonesia Group. Bergabung dengan Semen Indonesia Group

			<p>pada 1981 dan memiliki pengalaman luas dalam industri semen antara lain : pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Litbang Semen Padang (1990-1995), Direktur Litbang Semen Padang (1995-2003), dan Direktur Utama Semen Padang (2003-2005). Beliau juga menjabat Komisaris Utama PT Igaras (1998-2003). Koordinator Bidang Diklat dari Institut Semen dan Beton Indonesia (1993-2003). Pengurus Asosiasi Semen Indonesia (2000-2003). Meraih gelar Doktor Bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta, Magister Manajemen dari Universitas Andalas, Padang dan Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.</p>
2	Pengawas	Sunardi Prionomurti, S.E., M.M.	<p>Menjabat sebagai Direktur Utama PT Semen Gresik sejak 20 Juni 2014 hingga sekarang, sebelumnya sejak 24 Desember 2013 menjabat sebagai Direktur Keuangan. Pernah memegang berbagai jabatan penting di Grup Semen Indonesia, antara lain sebagai Direktur Utama PT Varia Usaha (2012-2013), Sekretaris Perusahaan PT Semen Gresik (Persero) Tbk (2008-2012), Kepala Divisi Pengembangan (2007-2008) dan Kepala Divisi Keuangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk (2006-2007). Mulai bergabung dengan PT Semen Gresik (Persero) Tbk pada tahun 1990. Sebelumnya berpengalaman</p>

			<p>sebagai auditor pada kantor Akuntan Publik. Meraih gelar Magister Management dari Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga tahun 2009 dan Sarjana Ekonomi, bidang akuntansi pada tahun 1986. selain itu mengikuti berbagai kursus dan training yang relevan dengan tugasnya di dalam dan di luar negeri, diantaranya workshop Capital Market di New York, workshop Global Cement Manufacturing di Meksiko, Diving Business Success Through Effective Cash Management Strategis di Malaysia, workshop on Corporate Transparency dan Good Governance di Singapura dll.</p>
3	Pengawas	Muhammad Soffan Heri, S.H.,M.H.	<p>Menjabat sebagai Kepala Departemen Hukum dan Manajemen Resiko Semen Gresik pada tahun 2011 hingga sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai Satuan Pengawas Intern (1987-1993), Sekretaris Koperasi KWSG dan Proyek Tuban 1 (1993-1994), PT.Varia Usaha Beton (1994-1995), Kepala Seksi Kepegawaian Tuban (1995-2000), Kepala Bagian Kepegawaian (2001-2003), Pada tahun 2008 Proyek Tuban IV, GM Administrasi Support Function, pada bulan September 2009 merangkap sebagai Ketua Tim Pengadaan Bahan Baku Tuban dan Sekretaris Dewan Pengawas Dana Pensiun SG, pada tahun 2009 akhir merangkap sebagai Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun SG, di tahun 2010 merangkap sebagai GM</p>



			Central Procurement dan pada bulan April merangkap sebagai Kepala Divisi Hukum dan Manajemen (2008-2010). Pendidikan terakhir S2, Magister Hukum Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya.
4	Pengawas	Faf Adisyamsul, M.M.	Menjabat sebagai Direktur Utama PT Varia Usaha sejak 2013 hingga sekarang, sebelumnya sejak tahun 2007 menjabat sebagai Kepala Departemen Sosial PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Pernah memegang berbagai jabatan penting di PT Semen Gresik (Persero) Tbk. antara lain Bagian Pergudangan (1979-1989), Bagian Pemasaran (1989-1994), Pengurus KWSG (1994-2003), Dep. Pengembangan Manajemen Perusahaan (2003-2004), Kepala Bagian PKBL (2004-2007). Pendidikan terakhir S2 Manajemen Pemasaran.
5	Ketua Pengurus	Soesetyoko Soewandi, S.E.	Menjabat sebagai Ketua Pengurus Harian Semen Indonesia Foundation pada tanggal 11 Maret 2011 hingga sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai Peneliti Pengembangan Manajemen (1988-1990), Peneliti Pengembangan Usaha (1990-2003), Peneliti Madya Pengembangan Manajemen (2003-2007), Staff Advisor dan Consultan Project Director Proyek Tuban IV (2007-2010), Staf Ahli Direktur Keuangan (2010-2011). Pendidikan terakhir S1, Manajemen Keuangan.
6	Sekretariat Pengurus	Ahmad Jakfar, S.E., M.M.	Menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Harian Semen Indonesia Foundation pada tanggal 11 Maret

			<p>2011 hingga sekarang, mengawali karir di Rumah Sakit Semen Gresik menjabat sebagai Kepala Bidang Rekam Medik (1997 - Juni 2001), Staff Perencanaan SDM PT.Semen Gresik (PERSERO) Tbk. (Juli 2001 - September 2001), General Manager Bidang Usaha di PT. Swabina Gatra (2001-2010), Staf Manager Procurement Proyek Tuban IV (2010-2011). Pendidikan terakhir S2, Magister Manajemen jurusan Pemasaran.</p>
7	Bendahara Pengurus	Muhammad Juhan Suchayono	<p>Menjabat sebagai Bendahara Pengurus Harian Semen Indonesia Foundation pada tanggal 1 Maret 2014 hingga sekarang, mengawali karir di PT Semen Gresik (persero) Tbk di Bagian Akuntansi (Maret 1996 - Februari 2006), Bagian pelayanan pelanggan PT. Semen Gresik (PERSERO) Tbk. (Januari 2009 - Januari 2011), Seksi Bina Lingkungan PT. Semen Gresik (PERSERO) Tbk (Januari 2011 - Maret 2014). Pendidikan terakhir D3 UNIV. AIRLANGGA Jurusan Ekonomi - Akuntansi 1986.</p>

Sumber : Semen Indonesia Foundation, 2014

## B. Penyajian Data

### 1. Implementasi Program *Waste to Zero* di bidang Lingkungan Hidup

Program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup penelitiannya berada di lokasi TPA Ngipik Kabupaten Gresik. Proses implementasinya menurut Bapak Hari Sugiantono, selaku Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan Semen Indonesia Foundation, yaitu :

“...jadi yang pertama itu pemerintah daerah meminjam lahan di Semen Gresik untuk membuang sampah dengan adanya itu kan solusinya gak ada sampah di biarkan menggunung kalo menggunung semakin tahun semakin tinggi nah itu Semen Indonesia atau Semen Gresik tadi itu cari solusi dimana salah satunya menggunung itu sudah mengganggu di kehidupan masyarakat satu bau dua gak nyaman karena ini dipemukiman padat ditengah kota, setelah dipikir-pikir Semen Gresik melihat ini mencari alternative membuat gimana sampah ini menjadi habis karena ini ditengah kota menjadi tanggungjawab perusahaan pemerintah dimana-mana sampah itu sulit penanganannya dibiarkan menggunung gitu aja, nah Semen Gresik membuat projek yaitu *waste to zero* ini yang baru terealisasi tahun 2013 dan 2014 jadi selanjutnya pemerintah juga memiliki solusi juga tidak bisa membuang disini karena sudah mengganggu kenyamanan tadi ini ditengah kota dipusat kota karena satu ini lahannya Semen dua dipusat kota mengganggu kenyamanan masyarakat bau kendaraan itu sering lewat, pemeritah saya mendengar ada rencana mau bikin TPA yang seluas 20ha itu adanya di Banyu Tengah di daerah Panceng Kabupaten Gresik itu disana nanti kalo disana itu masi bebas karena disana jauh dari pemukiman.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hari, tanggal 10 Mei 2016, jam 14.00 WIB)

#### a. Aktor yang Terlibat

Aktor yang ada dalam program *waste to zero* ini terdiri dari peran dan koordinasi. Pengkoordinasian yang dikaji dalam penulisan ini akan dibagi kedalam beberapa tahap. Diantaranya yaitu, (1) tahap pra konstruksi implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup, (2) tahap konstruksi implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup, (3) tahap operasi



pembangunan program *waste to zero*, dan (4) tahap pasca operasi pembangunan program *waste to zero*. Dimana setiap tahap yang telah disebutkan diatas, terdapat banyak aktor yang terlibat untuk saling berkoordinasi satu sama lain. Selanjutnya akan dijelaskan masing-masing bentuk koordinasi dan peran yang melibatkan berbagai banyak aktor dibawah ini.

1) Tahap pra konstruksi implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup

Persiapan/Penyediaan Lahan pengelolaan sampah di Desa Ngipik dalam rangka implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup melibatkan beberapa aktor yang turut berperan. Beberapa aktor tersebut saling berkoordinasi satu sama lain pada setiap kegiatan yang telah diagendakan. Pada awal mula persiapan implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup, Semen Indonesia Foundation (SMIF) dengan beberapa aktor, yaitu Kepala Desa Ngipik, Kepala Camat Ngipik, dan Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik.

Menurut Bapak Hari selaku Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan :

“...lahan yang akan digunakan dalam pengelolaan sampah ini sendiri adalah milik Semen Gresik, BLH hanya membantu mengurus perizinan yang terkait pembangunan proyek sampah ini.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hari, tanggal 20 April 2016, jam 11.00 WIB)

Adapun bentuk koordinasi diantara para aktor tersebut terbagi dalam 2 agenda. Dimana jarak pada setiap agenda tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, hal ini disebabkan oleh bahan diskusi yang harus dipersiapkan oleh Semen Indonesia Foundation (SMIF). Agenda yang pertama yaitu, mengkaji tentang penyamaan persepsi tentang sampah, bagaimana dampak yang

ditimbulkan jika sampah tidak dikelola secara berkelanjutan, dan pengenalan program *waste to zero*. Dimana Semen Indonesia Foundation (SMIF) merekomendasikan untuk menerapkan program tersebut dalam rangka menanggulangi masalah pencemaran lingkungan pada kawasan industry Gresik akibat lokasi TPA yang berada di tepi telaga. Menurut Bapak Soesetyoko selaku Ketua Pengurus SMIF :

“...TPA yang ada di Ngipik ini adalah lahan milik Semen Indonesia untuk membantu mengatasi pengurangan sampah Kota Gresik, Semen membuat inovasi baru dengan adanya program *waste to zero*.” (Hasil wawancara dengan Bapak Soesetyoko, tanggal 14 April 2016, jam 08.00 WIB)

Selanjutnya, pada agenda kedua. Semen Indonesia Foundation (SMIF) bersama para aktor yang telah disebutkan sebelumnya berdiskusi tentang adanya kesepakatan dalam menindaklanjuti pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa tokoh masyarakat yang terlibat dalam tahap ini menyetujui adanya penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup. Demikian adalah bentuk koordinasi antara Semen Indonesia Foundation (SMIF) dengan berbagai aktor yang telah disebutkan sebelumnya pada tahap pra konstruksi implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya akan dibahas mengenai bentuk koordinasi pada tahap kedua, yaitu :

- 2) Tahap konstruksi implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup

Pada tahap konstruksi Semen Indonesia Foundation memberikan kesempatan kerja dengan menginformasikan rencana kegiatan proyek ini ke

masyarakat dan mengutamakan warga sekitar untuk dapat bekerja di proyek. Konstruksi pembangunan *waste to zero* jadi, Semen Indonesia Foundation mulai memberikan kewenangan kepada pengurus divisi pengelolaan lingkungan untuk mengelola program *waste to zero*. Setelah berdirinya program *waste to zero*, pengurus divisi pengelolaan lingkungan mulai mengelola seluruh kegiatan di *waste to zero*, mulai dari bidang kepegawaian hingga mengoperasikan kegiatan teknis pengelolaan sampah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Hari selaku Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan :

“...saya mendapatkan wewenang perekrutan pegawai program *waste to zero* ini oleh Ketua SMIF. Perekrutan pegawai ini di utamakan warga sekitar yang ada di wilayah dekat pabrik ini untuk dapat bekerja di proyek. Pelaksanaan kegiatan di kendalikan SMIF untuk pengawasan dilakukan oleh Kades/Camat setempat, Badan LH Kab.Gresik, dan Dinas Tenaga Kerja Kab.Gresik. Hari aktif kerja mulai dari senin-jumat dan jam kerja disesuaikan jam kantor pada umumnya”. (Hasil wawancara dengan Bapak Hari, tanggal 22 April 2016, jam 10.00 WIB)

Tanpa adanya koordinasi kedua pihak antara SMIF dan Badan LH Kab.Gresik maka proyek pengelolaan sampah ini tidak akan berjalan dengan baik dalam perekrutan pegawai. Hal ini sebagaimana akan disampaikan oleh Bapak Heru, petugas BLH :

“...BLH di beri kuasa oleh SMIF untuk menjadi pengawas dilaksanakannya program *waste to zero*. SMIF hanya sebagai pelaksana program *waste to zero*. Dengan adanya kerjasama dalam perekrutan pegawai dari pihak BLH juga meminta persetujuan dan pertimbangan tenaga kerja oleh pihak SMIF agar program ini berjalan baik”. (Hasil wawancara dengan Bapak Heru, tanggal 05 Mei 2016, jam 15.00 WIB)

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Hari dan Bapak Heru, bahwa di antara dua pihak yaitu Semen Indonesia Foundation (SMIF) dan Badan



Lingkungan Hidup Kab.Gresik memiliki tugas masing-masing dalam program *waste to zero*. Kesepakatan yang ada para pegawai diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan semaksimal mungkin dalam menangani permasalahan sampah ini.

### 3) Tahap operasi pembangunan program *waste to zero*

Pada tahap ini Semen Indonesia Foundation (SMIF) berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Koordinasi ini bertujuan untuk merealisasikan pembangunan TPA di Desa Ngipik melalui adanya dana CSR dari PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Selain itu, instansi juga memberikan bantuan dalam bentuk sarana prasarana dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan pengelolaan sampah *waste to zero*. Proyek ini juga menjadi jawaban langsung keraguan pihak luar akan komitmen Semen Indonesia pada lingkungan. Di saat sampah kota menjadi problem pelik yang dihadapi banyak pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia, Semen Indonesia memberi solusi langsung di lapangan. Pemerintah Kabupaten Gresik menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan keberadaan program pengolahan sampah ini. Menurut Bapak Sumarno selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Gresik :

“Setiap hari, ada sebanyak 225 ton sampah yang masuk ke sini (TPA Ngipik). Jika hanya mengandalkan proses alami, saya kira cepat atau lambat lahan akan habis. Karena itu, keberadaan alat ini sangat membantu kami.” (Hasil wawancara dengan Bapak Sumarno, tanggal 05 Mei 2016, jam 15.00 WIB)

Urusan lahan, apalagi dipakai untuk TPA, bukan hal mudah untuk mendapatkannya. Disebabkan, sederet dampak yang ditimbulkan, tak semua kawasan mau ditempati. Beruntung bagi Pemkab Gresik yang mendapatkan ijin

pinjam pakai dari Semen Indonesia untuk menempati lahan seluas 6 ha yang dipakai TPA Ngipik ini. Menurut Bapak Hari selaku Kepala Divisi Pengelola

Lingkungan :

“...lahan seluas 6ha ini tidak semata-mata hanya untuk tempat pembuangan tapi sampah yang ada disana harus bisa dikelola agar bermanfaat, maka dari itu Semen membantu Pemkab Gresik dalam program waste to zero ini.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hari, tanggal 22 April 2016, jam 10.00 WIB)

4) Tahap pasca operasi pembangunan program *waste to zero*

Pada tahap pasca operasi ini penanggung jawab kegiatan mempunyai kewajiban untuk memulihkan semua aspek lingkungan yang terkena dampak akibat kegiatannya. Upaya yang dilakukan pada tahap pasca operasi yaitu penutupan area kegiatan dan pembersihan lahan. Penutupan area yang dimaksud ini pemutusan kerja yang dimana banyaknya jumlah tenaga kerja yang dirumahkan tidak lepas dari itu Semen Indonesia Foundation memberikan pesangon yang layak dan memberikan alternative pekerjaan lain. Menurut Bapak Soesetyoko selaku Ketua Pengurus SMIF :

“...tenaga kerja yang bekerja untuk program waste to zero tidak semuanya akan dirumahkan karena sebagian pegawai tetap dan ada sebagian pegawai outsourcing.” dengan Bapak Soesetyoko, tanggal 14 April 2016, jam 08.00 WIB)

Pembersihan lahan yang dilakukan Semen Indonesia Foundation ialah pembersihan lahan area bekas kegiatan dengan semaksimal mungkin dengan cara yang seaman mungkin, menampung dan membuang timbulan sampah yang dihasilkan dari kegiatan pembersihan lahan bekas area kegiatan. Adapun hal yang melatarbelakangi kegiatan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hari :

“...karena program *waste to zero* terbentuk berdasarkan Nota Kesepahaman, meskipun Semen Indonesia Foundation sangat berperan dalam hal tersebut dari pihak SMIF hanya dapat membantu mengatasi pengelolaan sampah yang sudah tertimbun dari beberapa tahun lalu saja dan ada jangka waktunya”. (Hasil wawancara dengan Bapak Hari, tanggal 22 April 2016, jam 10.00 WIB)

Setelah program *waste to zero* usai Semen Indonesia Foundation memiliki rencana akan membuat lahan yang berada di atas seluas 20x80m<sup>2</sup> ini menjadi *botanica garden*. Rencana yang akan dilakukan Semen Indonesia Foundation ini semata-mata ingin membuat lahan yang berada di Ngipik ini tidak sia-sia dan setidaknya akan terawat jika benar-benar akan dikelola seperti itu.

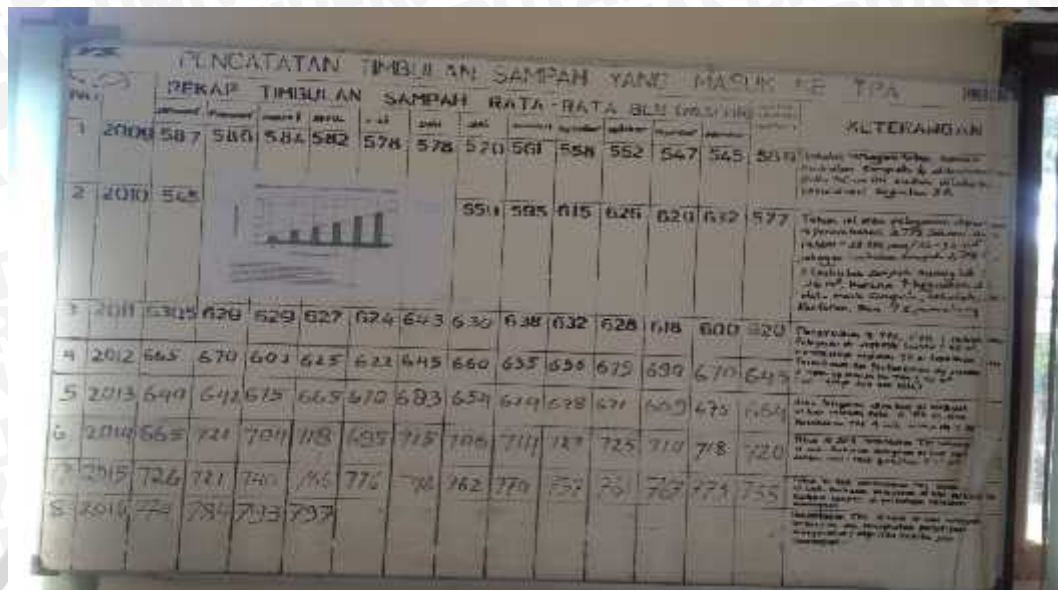
#### **b. Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan dalam program *waste to zero* disini ada 4 tahap yaitu, (1) tahap pra konstruksi, (2) tahap konstruksi, (3) tahap operasi, dan (4) tahap pasca operasi. Disini akan dideskripsikan dari tahap awal sampai akhir.

##### **1. Tahap Pra Konstruksi**

Tahap pra konstruksi program *waste to zero* berhubungan dengan kegiatan persiapan/penyediaan lahan. Pada saat ini TPA yang ada di Kabupaten Gresik sendiri ini memakai TPA Ngipik. Lahan yang dipersiapkan untuk kegiatan program *waste to zero* seluas ± 20x80m yang terletak di area TPA Ngipik yang secara administrasi berada di Kelurahan Ngipik Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. TPA Ngipik sendiri adalah pusat dari pengumpulan sampah yang ada di seluruh Kabupaten Gresik. Luas dari TPA 6ha ditambah 3ha. Jumlah sampah yang ada di TPA Ngipik perhari makin banyak.





**Gambar 5. Timbulan Sampah Yang Masuk ke TPA**

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik, 2016

Volume sampah yang ada dari tahun ke tahun semakin hari meningkat. Pada gambar 5 ini menunjukkan timbulan sampah tiap bulannya membuktikan bahwa sampah yang berada di Kota Gresik ini meningkat tiap tahun per bulannya. Semen Indonesia Foundation membuat pabrik pengelolaan sampah yaitu *waste to zero* untuk mengatasi penumpukan sampah yang ada di lahan milik PT. Semen Indonesia itu. Menurut bapak Hari selaku ketua dari pengelolaan lingkungan hidup dari SMIF tentang *waste to zero* di Kota Gresik, yaitu :

“...Disini TPA Ngipik adalah pusat dari TPA di Kabupaten Gresik. Disini PT.Semen sudah menyediakan lahan yang lebar dan besar juga mbak. Sampah tiap tahun di Kabupaten Gresik tiap hari tambah banyak. Maka dari itu SMIF membuat *waste to zero* agar sampah-sampah ini tidak menggunung terus”. (wawancara dengan bapak Hari, tanggal 22 April 2016, jam 10.00 WIB)

Jumlah timbunan sampah di TPA Ngipik dikurangi melalui pengelolaan sampah *waste to zero* yang. Ada pula cara di TPA Ngipik menggunakan sistem *semi sanitary landfill*, yakni menimbun tumpukan sampah dengan tanah dalam periode tertentu. Pegawai yang ada di TPA Ngipik juga setiap hari mengerjakan tumpukan sampah yang ada di TPA tersebut. Para pegawai kebersihan di TPA ini berperan aktif agar sampah-sampah di TPA Ngipik ini tidak akan menumpuk lagi. Menurut bapak Heru selaku petugas retribusi BLH, yaitu :

“Sampah-sampah di TPA ini mbak dikelola atas persetujuan dua belah pihak yaitu dari PT. Semen (SMIF) dan Pemerintah Daerah (BLH). Sampah-sampah disini makin hari makin banyak tapi semenjak ada pabrik pengelolaan sampah yang dibuat PT. Semen membantu sekali pemerintah dalam mengatasi penumpukan sampah tidak seperti dulu hanya bisa menimbun tanpa ada proses pengelolaan sampah”. (wawancara dengan bapak Heru, tanggal 5 Mei 2016, jam 15.00 WIB)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngipik ini bertempat di tengah-tengah kawasan industri di Kabupaten Gresik. Pencemaran semakin banyak jika sampah yang tertumpuk ini tidak segera diatasi. Peran Pemerintah disini hanya sebagai pengawas adanya kegiatan dan Semen Indonesia Foundation selaku yayasan dari PT.Semen Indonesia sebagai pelaksana dalam program *waste to zero*. Lokasi TPA di Ngipik bisa dilihat pada Gambar 6.





**Gambar 6. Lokasi TPA di Ngipik**

*Sumber : Semen Indonesia Foundation, 2014*

## 2. Tahap Konstruksi

Kegiatan tahap konstruksi kegiatan Program *Waste To Zero* ini terdiri dari pembangunan program *waste to zero* dan gudang, pemasangan mesin/peralatan, serta pembangunan sarana prasarana lainnya. Adapun uraian kegiatan pada tahap konstruksi sebagai berikut.

### a. Mobilisasi Tenaga Kerja dan Pembersihan Lahan

Pada awal kegiatan konstruksi dilakukan kegiatan mobilisasi tenaga kerja yang akan bekerja di proyek. Tenaga kerja yang akan digunakan selama tahap konstruksi tersebut terdiri dari tenaga ahli, menengah dan tenaga kerja yang tidak membutuhkan keahlian tertentu. Menurut Bapak Hari selaku Kepala Divisi

Pengelola Lingkungan :

“...tenaga yang bekerja disini ada sebagian pekerja outsourcing yang bekerja sebagai pelaksana dalam program ini.” (wawancara dengan bapak Hari, tanggal 22 April 2016, jam 10.00 WIB)



Pembersihan lahan dari kegiatan lama serta pembangunan *waste to zero* serta sarana penunjang lainnya. Sebelum mengetahui proses pengelolaan sampah harus lebih mengerti macam-macam sampah.



**Gambar 7. Jenis-jenis Sampah**

Sumber : Semen Indonesia Foundation, 2014

Penjelasan dari gambar diatas bahwa sampah dibagi menjadi 2 yaitu organik dan non-organik. Organik dan non-organik ini masing-masing menjadi juga dibagi menjadi 2 yaitu degradable dan non-degradable.

(1) Sampah organik - dapat diurai (*degradable*)

Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos

(2) Sampah anorganik - tidak terurai (*undegradable*)

Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya.

b. Mobilisasi Material Bangunan dan Peralatan/Mesin

Kegiatan mobilisasi material bangunan yang digunakan untuk kegiatan *waste to zero* dan gudang serta mobilisasi peralatan/mesin produksi yang akan digunakan untuk proses produksi. Menurut Bapak Yusuf selaku Manajer Divisi Pengelola Lingkungan :

“...untuk bagian gudang serta mobilisasi peralatan disini saya yang bertanggungjawab, proses produksi dalam pengelolaan sampah ini hasilnya masi digunakan Semen Indonesia belum diperjual belikan.” (wawancara dengan bapak Yusuf, tanggal 20 April 2016, jam 09.00 WIB)

c. Pembangunan *Waste to Zero* dan Fasilitas Pendukung Lainnya serta Pemasangan Peralatan/Mesin Produksi

Kegiatan ini merupakan pembangunan *waste to zero* dan gudang sesuai dengan kebutuhan. Disamping itu juga dibangun beberapa fasilitas penunjang lainnya. Kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan kegiatan pemasangan mesin/peralatan produksi yang akan digunakan pada saat tahap operasi. Alat berat excavator yang sudah ada di TPA penggunaannya sharing dengan BLH Gresik. Menurut Hari selaku Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan Semen Indonesia Foundation :

“...pembangunan keseluruhan pabrik ini dikerjakan dari pihak Semen Indonesia namun dalam proses pengelolaan dibantu oleh Badan Lingkungan Hidup excavator sendiri itu milik BLH, Semen Indonesia hanya sebagai pelaksana.” (wawancara dengan bapak Hari, tanggal 22 April 2016, jam 10.00 WIB)

#### d. Demobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja

Pada akhir tahap konstruksi ini dilakukan pekerjaan pengembalian peralatan yang dipakai selama kegiatan pembangunan *waste to zero* serta sarana dan prasarana lainnya. Setelah demobilisasi peralatan maka selanjutnya adalah demobilisasi tenaga kerja. Menurut Bapak Yusuf selaku manajer divisi pengelolaan lingkungan :

“...alat-alat yang selama pembuatan program ini mungkin sebagian banyak yang pinjam, maka dari itu akan diadakan pengembalian peralatan kepada yang bersangkutan, salah satu nya adalah truk pengangkut sampah.” (wawancara dengan bapak Yusuf, tanggal 20 April 2016, jam 09.00 WIB)

#### 3. Tahap Operasi

Kegiatan tahap operasi kegiatan Program *Waste to Zero* terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

##### a. Transportasi Kendaraan Keluar Masuk Lokasi

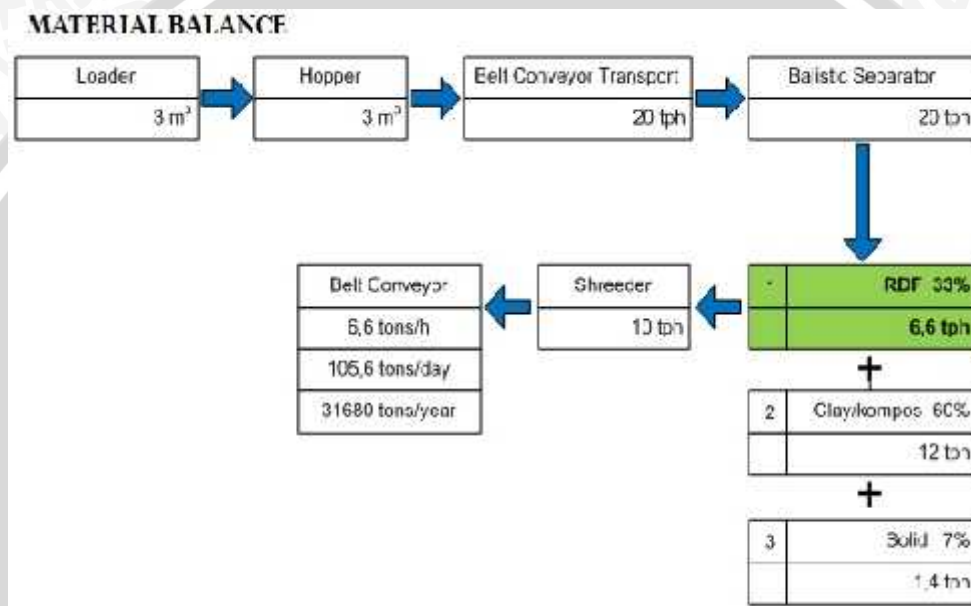
Kegiatan ini merupakan kegiatan transportasi kendaraan pengangkut bahan baku dan produk. Kegiatan ini berpotensi menimbulkan dampak peningkatan kadar debu dan penurunan kualitas udara. Menurut Bapak Hari selaku Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan Semen Indonesia Foundation :

“...truk yang mengangkut sampah dari satu tempat menuju pabrik pengelolaan sampah ini mungkin cukup jauh, dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar kurang nyaman dengan bau sampah yang diangkut oleh truk tersebut.” (wawancara dengan bapak Hari, tanggal 22 April 2016, jam 10.00 WIB)

##### b. Kegiatan Proses Produksi



Kegiatan operasional pada proses produksi yaitu *waste to zero* dengan menggunakan alat-alat sebagai media pengelola. Dalam proses tersebut dapat menimbulkan dampak penurunan kualitas udara dan kebisingan. Proses produksi tersebut dapat dilihat pada Gambar 8 dan 9.



**Gambar 8. Design Capacity**

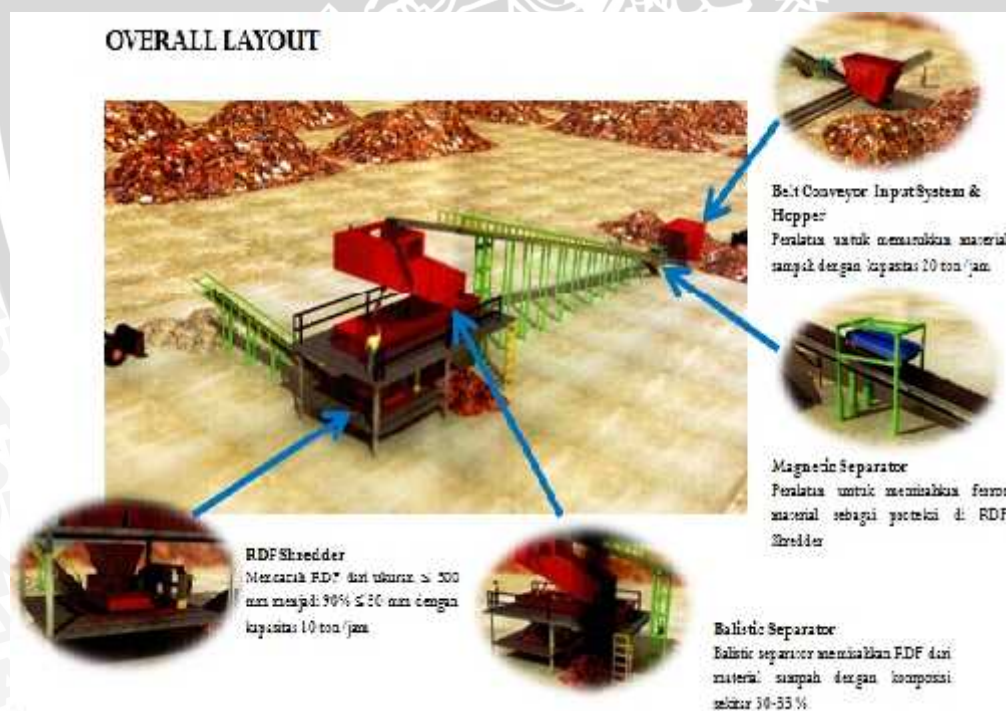
Sumber : Semen Indonesia Foundation, 2014

Design Capacity yang dimaksud dalam gambar 8 tersebut menjelaskan bahwa cara kerja alat ini cukup sederhana. Tumpukan sampah yang menggunung, dikeruk eskavator (loader) yang mampu mengangkut 3m<sup>3</sup> dimasukkan dalam hopper. Selanjutnya diangkut menuju mesin pemusnah melalui belt conveyor yang berkapasitas 20tph. Dari sini, mesin mulai bekerja. Tumpukan sampah tak beraturan ini dipilah oleh Balistic Separator yang mampu menangani kira-kira 20tph. Alat pemilah ini, membagi sampah dalam tiga kategori. Pertama, sampah

solid yang terdiri dari material berat. Batu, besi dan lainnya. Material ini dipilah tersendiri dan digunakan sebagai bahan reklamasi. Kedua, sampah jernih tanah halus, kayu lapuk dan material lunak lainnya. Sampah jenis ini, bisa dimanfaatkan sebagai bahan kompos. Ketiga yakni sampah plastik yang terdiri dari material berbahan baku plastik, kain, karet dan bahan sejenis. Inilah produk utama dari mesin ini. Material tersebut, diteruskan ke sheeder (mesin pencacah) berkapasitas 10tph. Dari sini, material plastik ini dicacah dengan ukuran 3 x 3 dan 3 x 5 cm.

Menurut Bapak Hari selaku Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan :

“Material plastik yang sudah tercacah ini, langsung masuk bag yang masing-masing berkapasitas 40 ton.” (wawancara dengan bapak Hari, tanggal 22 April 2016, jam 10.00 WIB)



Gambar 9. Aliran Operasional

Sumber : Semen Indonesia Foundation, 2014



Dilihat dari gambar 9 aliran operasional ini menjelaskan fungsi dari berbagai alat yang berhubungan dengan program *waste to zero*. Dimulai dari penjelasan di bagian kanan atas yaitu *Belt Conveyor Input System & Hopper*, peralatan untuk memasukkan material sampah dengan kapasitas 20 ton/jam. Lalu lanjut kebawah yaitu *Magnetic Separator* lanjut ke *Balistic Separator* dan berakhir di *RDF Shredder*.

#### 4. Tahap Pasca Operasi

Pada tahap pasca operasi ini penanggung jawab kegiatan mempunyai kewajiban untuk memulihkan semua aspek lingkungan yang terkena dampak akibat kegiatannya, antara lain :

##### a. Penutupan area kegiatan

Penutupan area kegiatan dilakukan ketika kegiatan Program *Waste to Zero* tidak beroperasi lagi. Hal ini menyebabkan tenaga kerja yang sudah tidak bekerja lagi dirumahkan dengan imbalan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Bapak Hari selaku Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan :

“...tenaga kerja yang dipulangkan ini adalah pekerja tidak atau outsourcing yang dimana tugasnya sudah tidak dibutuhkan lagi.”  
(wawancara dengan bapak Hari, tanggal 22 April 2016, jam 10.00 WIB)

##### b. Pembersihan Lahan

Pembersihan lahan dengan memulihkan kembali bekas bahan/material akibat kegiatan *waste to zero* di lokasi tersebut. Menurut Bapak Yusuf selaku Manajer Divisi Pengelolaan Lingkungan Hidup :

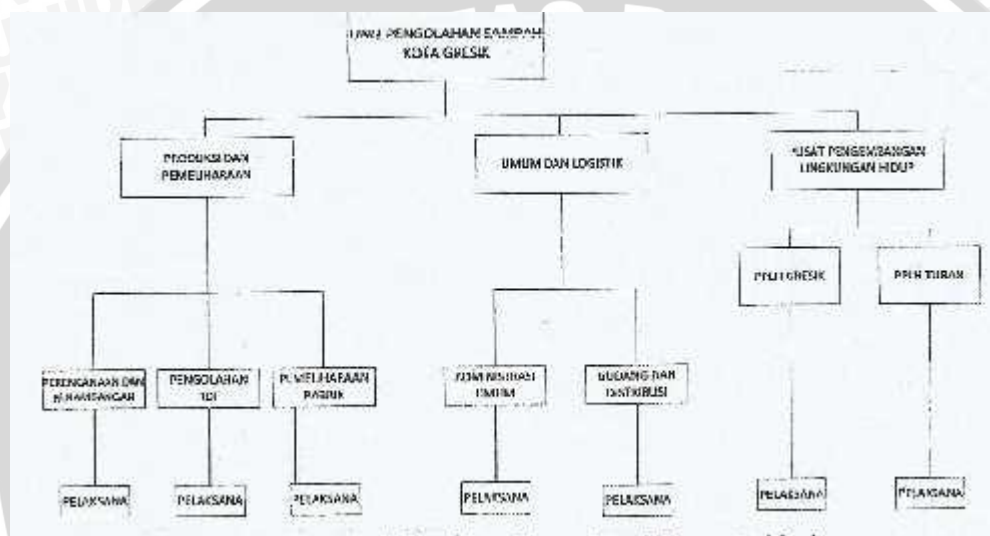
“...lahan bekas tumpukan sampah ini diharapkan bisa menjadi lokasi yang bermanfaat, rencana penutup program ini akan dibuat botanica garden agar lingkungan yang telah tercemari akan



menjadi lebih baik.” (wawancara dengan bapak Yusuf, tanggal 20 April 2016, jam 09.00 WIB)

### c. Dukungan SDM dan Biaya

Dukungan SDM dalam hal ini berkaitan dengan tenaga kerja. Berikut terdapat gambar 10 yang akan menjelaskan struktur organisasi tenaga kerja yang terlibat dalam proyek ini.



**Gambar 10. Struktur Organisasi Tenaga Kerja**

Sumber : Semen Indonesia Foundation, 2014

Dapat dilihat dari gambar di atas tenaga kerja yang terlibat untuk kegiatan operasional dari keseluruhan gambar  $\pm$  9 orang. Untuk periode program waste to zero dibagian Produksi dan Pemeliharaan, Pusat pengembangan Lingkungan Hidup, PPLH Gresik dan PPLH Tuban dijabat oleh Bapak Hari Sugiantono selaku Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan Semen Indonesia Foundation. Dimana tugasnya merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan sampah dan pengembangan lingkungan eks tambang PT.

Semen Indonesia Persero (Tbk). Pada bagian Perencanaan dan Penambangan, Pengelolaan RDF, dan Pemeliharaan Pabrik dijabat oleh Dwi Prasetyo dan Adhi Yatma yang bertugas melaksanakan dan melaporkan checklist rutin mesin pengolahan sampah, membuat/menulis laporan harian, dan melaksanakan kegiatan penambangan dan pengolahan sampah Ngipik.

Pada bagian Umum dan Logistik, Administrasi Umum, Gudang dan Distribusi dijabat oleh Bapak Yusuf Efendi selaku Manajer Divisi Pengelolaan Lingkungan Semen Indonesia Foundation dan Bapak R. Haryanto selaku Wakil Manajer Divisi Pengelolaan Lingkungan Semen Indonesia Foundation yang dimana memiliki tugas diantaranya merencanakan, mengkoordinasi, mengevaluasi dan menata kegiatan administrasi kesekretariatan dan kepegawaian. Dan bagian yang terakhir adalah Pelaksana dimana bagian ini dikerjakan oleh 4 orang outsourcing yaitu Djoko, M. Fahrizal, Mas Muchoir, dan Hendra yang bertugas mengoperasikan kegiatan pengelolaan MSW bahan RDF dari penambangan TPA dan mencatat kegiatan harian *waste to zero*.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
dalam Rp ribu										
<b>Pengeluaran biaya</b>										
Pemakaian listrik	900.000	331.500	964.359	957.946	1.032.771	1.069.918	1.106.330	1.145.051	1.185.128	1.226.638
SOM plus TIRI	585.000	599.300	641.144	666.004	734.345	765.420	840.409	879.230	962.184	1.029.537
BBM	516.000	584.800	635.640	666.792	700.132	735.138	771.895	819.490	851.014	891.555
Pemeliharaan	1.117.525	1.184.365	1.253.426	1.330.752	1.410.397	1.495.233	1.584.347	1.680.044	1.780.946	1.887.697
Sewa dump truck	192.000	209.510	213.731	228.875	243.335	256.929	279.356	284.697	304.019	304.330
Transportasi	3.675.000	3.358.750	4.051.688	4.254.172	4.466.385	4.660.335	4.934.851	5.171.094	5.425.649	5.701.131
<b>Total biaya</b>	<b>7.020.125</b>	<b>7.382.115</b>	<b>7.763.111</b>	<b>8.144.361</b>	<b>8.506.335</b>	<b>8.921.992</b>	<b>9.580.788</b>	<b>9.994.814</b>	<b>10.514.841</b>	<b>11.062.918</b>
<b>Pemasangan penjualan</b>										
Perjualn RDF	8.531.250	8.357.811	9.403.708	9.675.988	10.069.793	10.888.277	11.412.891	12.004.325	12.654.542	13.214.791
<b>total pemasukan</b>	<b>1.500.525</b>	<b>1.375.618</b>	<b>1.642.572</b>	<b>1.711.817</b>	<b>1.782.352</b>	<b>1.865.285</b>	<b>1.931.901</b>	<b>2.029.412</b>	<b>2.141.701</b>	<b>2.171.851</b>

**Gambar 11. Rincian Biaya yang akan dicapai**

Sumber : Semen Indonesia Foundation, 2014



Pada gambar tersebut SMIF memiliki prediksi pengeluaran biaya dan pemasukan penjualan dari hasil *waste to zero* dari tahun 2014-2023. Pengeluaran biaya ini terdiri dari pemakaian listrik, SDM plus THR, BBM, pemeliharaan, sewa dump truck, dan transportasi. Untuk pemasukan penjualan saat ini hanya ada penjualan RDF saja. Biaya yang dikeluarkan untuk program *waste to zero* ini sebesar 13,5 milyar rupiah. Menurut Bapak Hari selaku Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan :

“...Semen Indonesia memberikan dana CSR untuk pembuatan pabrik pengelolaan sampah sebesar 13,5 milyar. Dana tersebut keseluruhan digunakan untuk program *waste to zero* semata.” (wawancara dengan bapak Hari, tanggal 22 April 2016, jam 10.00 WIB)

#### d. Tujuan (capaian)

Kabupaten Gresik melalui Semen Indonesia Foundation (SMIF) melaunching program *waste to zero*, tanggal 15 September 2014. *Waste to zero* sendiri bertujuan untuk:

1. Mengembangkan kesadaran lingkungan hidup, sehingga masyarakat dapat lebih memahami prinsip-prinsip ekologi dalam kehidupan bersama, dengan maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan.
2. Mengurangi kebutuhan luasan lahan untuk TPA sampah kota di Kabupaten Gresik, sebesar 2,2 ha/tahun
3. Mengurangi bahan-bahan pencemaran tanah dari sampah ke lingkungan
4. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam rangka pengelolaan sampah kota



Program *waste to zero* ini juga bisa menambah pengetahuan dan wawasan baru mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar, sampah tidak hanya dibuang begitu saja, tetapi dapat dikembangkan menjadi bahan bakar "*solid fuel substitution*".

Mendukung upaya industri sebagai *green company* serta konservasi sumberdaya dan upaya penyelamatan lingkungan akibat sampah kota dengan kapasitas 650 m<sup>3</sup>/Hari atau + 217 ton/hari. Kendati begitu, selama tiga bulan terakhir, di masa trial, mesin hanya di push selama delapan jam per hari dengan kapasitas 500 ton per jam. Menurut Bapak Hari selaku Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan :

"Ini memang masih masa percobaan. Kita push pelan-pelan karena ini teknologi baru yang ada di Indonesia." (wawancara dengan bapak Hari, tanggal 22 April 2016, jam 10.00 WIB)



**Gambar 12.** Alur Proses “Waste to Zero” Produksi RDF (*Refuse Derived Fuel*)

Sumber : Semen Indonesia Foundation, 2014

Mendukung program efisiensi industri pemakai batubara dan sebagai energi substitusi batubara, minyak dengan energi baru terbarukan dari pengelolaan sampah kota “*Municipal solid waste*” menjadi RDF (*Refuse Derived Fuel*). Gambar di atas ini menjelaskan bagaimana proses waste to zero menjadi RDF (*Refuse Derived Fuel*). Dalam hal ini PT. Semen Indonesia mengurangi ketergantungan bahan bakar batu bara yang biasanya menjadi bahan tambahan pembuatan semen yang diganti bahan bakar ramah lingkungan hasil dari proses *waste to zero* dalam pengelolaan sampah.

## **2. Faktor-faktor penghambat dari Implementasi Program Waste to Zero di bidang Lingkungan Hidup**

Dalam hal ini Semen Indonesia Foundation memiliki kendala yang berkaitan dengan pengelolaan sampah berikut faktor-faktor penghambatnya adalah :

### **a. Masalah penanganan sampah.**

Penanganan sampah baru hulu nya saja sumber sampah belum ditangani (harus ada pemilihan sampah dari sumbernya). Sampah ada setiap hari dan penumpukan sampah semakin hari semakin banyak. Pengelolaan sampah lama masih menjadi kendala pengelolaan dikarenakan tumpukan sampah tiap hari semakin banyak yang baru cepat diproses akan tetapi yang lama harus dipilah dulu agar bisa diproses. Hal ini sebagaimana akan dijelaskan oleh Bapak Soesetyoko selaku Ketua Pengurus SMIF, yaitu :

“...penanganan sampah ini tidak bisa asal dikelola atau diproses akan tetapi harus dipilah dulu untuk bisa ditahap itu. Sampah yang ada di TPA Ngipik ini tidak hanya ada sampah baru saja akan tetapi ada sampah yang sudah menimbun dari tahun ke tahun.



Maka dari itu sumber sampah masi belum bisa ditangani karena butuh proses.” (Hasil wawancara dengan Bapak Soesetyoko, tanggal 14 April 2016, jam 08.00 WIB)

Permasalahan sampah memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas. Apabila kita kurang perhatian dengan lingkungan sekitar dengan tidak memperhatikan hal kecil seperti hal nya sampah. Jika sampah menumpuk terus tanpa ada cara pengelolanya atau tidak memberi solusi penanganannya maka sampah tersebut akan semakin banyak. Sejak adanya program *waste to zero* sampah yang ada di TPA Ngipik ini bisa teratasi meskipun belum keseluruhannya.

b. Mesin pengelolaan sampah kapasitasnya terbatas 217ton/hari.

Proses pengelolaan sampah ini jam kerja operasional tiap hari nya hanya 8 jam per hari. Hari kerja dalam pengelolaan sampah juga seperti karyawan/pekerja lainnya dari hari senin-jumat saja. Keterbatasan waktu membuat pengelolaan sampah ini masi belum maksimal. Jika dihitung setahun maka hanya 300 hari kerja untuk bisa mengelola sampah yang ada di TPA Ngipik tersebut. Sedangkan sampah yang menumpuk di TPA ini sudah ada dari bertahun-tahun lalu. Menurut Bapak Hari selaku Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan Semen Indonesia Foundation :

“...untuk penanganan pengelolaan sampah ini masi bisa belum maksimal dikarenakan pabrik aktif baru dimulai tahun 2014, setidaknya sedikit membantu penumpukan sampah yang ada di TPA meskipun belum keseluruhan tertangani.” (wawancara dengan bapak Hari, tanggal 22 April 2016, jam 10.00 WIB)

Tidak dipungkiri bahwa program *waste to zero* ini sangat membantu menangani permasalahan sampah yang ada di TPA Ngipik ini. Karena



keterbatasan ini diharapkan Pemerintah Daerah Gresik memiliki solusi lain dalam menangani sampah tersebut.

- c. Peraturan Pemerintah Daerah tentang pengelolaan sampah Kota Gresik belum ada.

Lahan TPA milik PT. Semen Indonesia yang selama ini dipakai Pemerintah Daerah yang berlokasi di Ngipik ini menjadi tempat pembuangan sampah dari seluruh Kabupaten Gresik terkecuali Bawean. Dengan menumpuknya sampah yang ada disana PT. Semen Indonesia memberi kuasa kepada Yayasan Semen Indonesia Foundation mengelola pengelolaan sampah untuk menangani sampah yang semakin hari bertambah banyak. Menurut Bapak Soesetyoko selaku Ketua Pengurus SMIF, yaitu :

“...sebagai Kota industri sebenarnya Pemda Gresik memiliki Undang-undang tentang pengelolaan sampah agar masyarakat lebih menghargai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Soesetyoko, tanggal 14 April 2016, jam 08.00 WIB)

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Daerah tentang pengelolaan sampah bisa membuat acuan Pemerintah untuk memahami apa dampak yang berpengaruh kepada masyarakat jika TPA pusat berada ditengah kota. Tidak hanya itu Pemerintah juga bisa membuat inovasi baru dengan membuat program sampah seperti Semen Indonesia Foundation.

## C. Pembahasan

### 1. Implementasi Program *Waste to Zero* di bidang Lingkungan Hidup

#### a. Aktor yang Terlibat

Aktor yang ada dalam penelitian ini ialah yang memiliki peran dan koordinasi pengelolaan lingkungan khususnya dalam bidang pengelolaan sampah. Menurut Solichin Abdul Wahab (2015:130-132), dalam implementasi program khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi pemerintah, sebenarnya dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yakni :

- a. Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center atau pusat*),
- b. Pejabat-pejabat pelaksana lapangan (*the periphery*), dan
- c. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (*target group*).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang kemudian telah di olah dalam hasil penyajian data pada pembahasan yang sama, koordinasi antara Semen Indonesia Foundation dengan beberapa aktor yang turut berperan (yang telah disebutkan sebelumnya) untuk saling berkoordinasi sesuai dengan tahapannya telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan berdasarkan hasil koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat tersebut mampu merealisasikan program *waste to zero*. Peran yang terkait dalam lingkup swasta disini ialah Semen Indonesia Foundation dimana tugasnya hanya menjadi pelaksana adanya program *waste to zero*. Sedangkan dari pihak pemerintah disini adalah Badan Lingkungan Hidup peran yang dilakukan yaitu sebagai pengawas dan pelapor adanya program *waste to zero* ini.

### **b. Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan dalam hasil penyajian data penelitian ini memiliki banyak tahap dari tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat Semen Indonesia Foundation berperan aktif dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Handoko (2000), bila perusahaan menamakan terlalu banyak dananya dalam persediaan, menyebabkan biaya penyimpanan yang berlebihan, dan mungkin mempunyai “*Opportunity Cost*” (dana dapat ditanamkan dalam investasi yang lebih menguntungkan”. Sebaliknya, bila perusahaan tidak mempunyai persediaan yang cukup dapat mengakibatkan biaya-biaya karena kekurangan bahan. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai tingkat dimana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Dalam praktek, pemaksimalan keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan. Ada perusahaan yang menekankan kepada volume penjualan dan ada pula yang memasukkan pertimbangan politik dalam menentukan tingkat produksi yang akan dicapai.

### **c. Dukungan SDM dan biaya**

Dukungan SDM dan biaya yang dikaji dalam penelitian ini menyangkut tentang jumlah tenaga kerja dan sebagai penyusunan pengelolaan anggaran yang meliputi biaya pemasukan dan biaya pengeluaran dalam periode perbulan atau pertahun. Yang dimaksud dukungan SDM ini ialah kinerja. Kinerja merupakan penampilan hasil karya seseorang dalam bentuk kualitas ataupun kuantitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun



kelompok kerja pegawai. Tiga hal penting dalam kinerja adalah tujuan, ukuran, dan penilaian. Penentuan tujuan setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi dari setiap personel. Tetapi ternyata tujuan saja tidak cukup, sebab itu diperlukan ukuran apakah seseorang personel telah mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk itu penilaian kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan personel memegang peranan yang penting. Akhir dari proses kinerja adalah penilaian kinerja itu sendiri yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan.

Menurut Nawawi (2000:97) ada beberapa dimensi yang dijadikan ukuran kinerja yaitu :

1. Tingkat kemampuan kerja (kompetensi) dalam melaksanakan pekerjaan baik yang diperoleh dari hasil pendidikan dan pelatihan maupun yang bersumber dari pengalaman kerja.
2. Tingkat kemampuan eksekutif dalam memberikan motivasi kerja, agar pekerja sebagai individu bekerja dengan usaha maksimum, yang memungkinkan tercapainya hasil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk manajemen sumber daya manusia, proses penilaian kinerja dapat menunjukkan adanya kebutuhan akan adanya pengembangan tambahan sebagai suatu alat untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya hasil penilaian kinerja yang mengindikasikan bahwa seorang pegawai mempunyai potensi untuk bekerja dengan baik di suatu posisi yang dipromosikan, maka pegawai tersebut mempunyai kesempatan untuk menduduki suatu posisi yang lebih tinggi.

Penilaian kinerja yang bertujuan pengembangan juga mencakup pemberian pedoman kinerja pegawai di kemudian hari. Umpan balik akan menyadarkan

pegawai tentang kelemahan dan kekuatan kinerja massa lalu dan menentukan arah yang harus dipilih pegawai untuk memperbaikinya. Pegawai ingin mengetahui secara khusus, bagaimana mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka di masa mendatang. Karena penilaian kinerja dirancang untuk menanggulangi masalah-masalah kinerja yang buruk, penilaian harus dirancang untuk mengembangkan pegawai dengan lebih baik.

Setelah mengetahui teori yang berkaitan dengan dukungan SDM maka akan dijelaskan pula teori yang berkaitan dengan biaya. Biaya yang dibahas disini ialah biaya tetap (Zulkifli; 2003, 34) merupakan biaya yang jumlahnya sampai tingkat kegiatan tertentu relatif tetap dan tidak terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai dengan tingkatan tertentu. Biaya tetap per unit berbanding terbalik secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau kapasitas. Semakin tinggi tingkat kegiatan, maka semakin rendah biaya tetap per unit. Semakin rendah tingkat kegiatan, maka semakin tinggi biaya tetap per unit. Dalam hubungannya dengan perilaku biaya, maka biaya tetap dapat digolongkan menjadi dua yaitu (Mulyadi, 1984: 58) :

- b. Committed fixed cost meliputi semua biaya yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran dan administrasi. Perilaku Committed fixed cost ini dapat diketahui dengan jelas dengan mengamati biaya-biaya yang tetap dikeluarkan jika seandainya perusahaan tidak melaksanakan kegiatan sama sekali dan akan kembali ke kegiatan normal (misalnya selama pemogokan buruh atau saat kekurangan bahan yang memaksa perusahaan menutup sama sekali kegiatan operasionalnya), dalam hal ini committed fixed cost berupa

semua biaya yang tetap dikeluarkan, yang tidak dapat dikurangi untuk mempertahankan kemampuan perusahaan di dalam memenuhi tujuan jangka panjangnya. Contohnya adalah Biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, biaya sewa dan biaya asuransi.

- c. Discretionary fixed cost Merupakan biaya yang timbul dari keputusan dan penyediaan anggaran secara berkala yang secara langsung mencerminkan kebijaksanaan manajemen. Discretionary fixed cost sering juga disebut managed atau programmed cost. Biaya ini tidak mempunyai hubungan tertentu dengan volume kegiatan. Contohnya : biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan biaya pelatihan karyawan

#### d. Tujuan (capaian)

Tujuan adanya program *waste to zero* ialah membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam rangka pengelolaan sampah kota. Mengembangkan kesadaran lingkungan hidup, sehingga masyarakat dapat lebih memahami prinsip-prinsip ekologi dalam kehidupan bersama, dengan maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan. Dan juga memanfaatkan sampah kota sebagai bahan bakar di industri semen. Menurut Steers (1985:87) mengemukakan bahwa : “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Adapun Martoyo (1998:4) memberikan definisi sebagai berikut: “Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.”



## 2. Faktor-faktor penghambat dari Implementasi Program *Waste to Zero* di bidang Lingkungan Hidup

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak semuanya berjalan dengan baik. Untuk mengatasi agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan ditiru oleh publik. Kebijakan publik harus memperhatikan hal-hal yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi.

Menurut Islamy (2004:36) menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi :

- 1) Keterbatasan sumber-sumber.
- 2) Kesalahan dalam administrasi.
- 3) Respon masyarakat terhadap kebijakan Negara dengan cara-cara mereka sendiri.
- 4) Tujuan kebijakan Negara bertentangan satu sama lain.
- 5) Usaha memecahkan masalah memakan biaya lebih besar dari masalah itu sendiri.
- 6) Sedikitnya faktor-faktor yang dipertimbangkan.

Melihat beberapa hal yang dapat menyebabkan gagalnya suatu kebijakan pengelolaan sampah pada program *waste to zero* di Kabupaten Gresik tidak menunjukkan adanya hal-hal yang menyebabkan gagalnya suatu kebijakan. Keterbatasan sumber-sumber diatasi dengan adanya pengelolaan sampah dengan program *waste to zero*. Sebagai salah satu bentuk solusi dari permasalahan sampah dan hasil yang diberikan tidak saja bernilai ekonomis, tetapi juga menjadikan lingkungan hijau, bersih dan bebas dari sampah. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi program *waste to zero* ini yang ditemui di lapangan bukanlah masalah serius dalam pelaksanaannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup ( Studi tentang Corporate Social Responsibility / Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada SMIF Gresik ), serta berbagai penjelasan-penjelasan berdasarkan hasil kondisi yang terjadi di tempat penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup

- a. Aktor yang Terlibat

PT. Semen Indonesia memberi kuasa kepada yayasan Semen Indonesia Foundation (SMIF) sebagai pelaksana adanya proyek *waste to zero* selaku pihak dari swasta. Pada pihak pemerintah yang ikut berperan ialah Badan Lingkungan Hidup dimana tugas yang dilakukan sebagai pengawas dan pelapor dari seluruh kegiatan yang ada pada proses *waste to zero*.

- b. Bentuk Kegiatan

Bentuk Kegiatan pada program *waste to zero* ini memiliki 4 tahap yaitu :

- (1) tahap pra konstruksi, (2) tahap konstruksi, (3) tahap operasi, dan yang terakhir (4) tahap pasca operasi.

c. Dukungan SDM dan Biaya

Dukungan SDM dan biaya sudah sesuai dengan teori yang ada. Dari dukungan SDM ini penilaian kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan personel memegang peranan yang penting, akhir dari proses kinerja adalah penilaian kinerja itu sendiri yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan. Dan semua biaya yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran dan administrasi sudah dikendalikan semua oleh Semen Indonesia Foundation (SMIF).

d. Tujuan (capaian)

Tujuan atau capaian yang diinginkan untuk program wasteto zero ini adalah :

- (1) Mengembangkan kesadaran lingkungan hidup, sehingga masyarakat dapat lebih memahami prinsip-prinsip ekologi dalam kehidupan bersama, dengan maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan.
- (2) Mengurangi kebutuhan luasan lahan untuk TPA sampah kota di Kabupaten Gresik, sebesar 2,2 ha/tahun.
- (3) Mengurangi bahan-bahan pencemar tanah dari sampah ke lingkungan.
- (4) Memanfaatkan sampah kota sebagai bahan bakar di industri semen.



2. Faktor-faktor penghambat dari implementasi program *waste to zero* di bidang lingkungan hidup
  - a. Penanganan sampah baru hulu nya saja sumber sampah belum ditangani (harus ada pemilihan sampah dari sumbernya).
  - b. Mesin pengelolaan sampah kapasitasnya terbatas 217ton/hari.
  - c. Peraturan Pemerintah Daerah tentang pengelolaan sampah Kota Gresik belum ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian skripsi ini, maka peneliti mencoba memberikan masukan saran sebagai rekomendasi, yaitu :

1. Sebagai perusahaan yang peduli lingkungan Semen Indonesia Foundation (SMIF) sebaiknya mengadakan seminar mengenai peduli lingkungan untuk memberikan pengertian dan pengetahuan kepada masyarakat dalam mengatasi sampah yang ada di sekitar kita.
2. Pemerintah harus mempunyai solusi/inovasi baru untuk mengatasi sampah yang tiap hari semakin menumpuk. Tidak hanya mengatasi tetapi pemerintah harus mencari lahan untuk pembuangan sampah karena lahan yang saat ini dipakai untuk pembuangan adalah lahan milik PT. Semen Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambadar, J. 2008. *CSR dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Amsyah, Zulkifli. 2003. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bahar, Yul H. 1986. *Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta : PT. Waca Utama Pramesti.
- Budiardjo, M. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Budimanta, Arif, Adi Prasetijo, dan Bambang Rudito. 2005. *Corporate Social Responsibility, Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini. Indonesia Center for Sustainable Development*.
- Chalekian, Paul. 2013. *POSDCORB: Core Patterns of Adminisration. Dalam Conference Version Draft*.
- Damanhuri, Enri, dan Tri Padmi. 2011. *Buku Ajar Teknologi Pengelolaan Sampah*. Bandung : ITB Press.
- Djamarah, Zain. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Djanegara, Soerja. 2008. *Menuju Good Corporate Governance*. Bogor: Kesatuan Press.
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjahmada University Press.
- Erni Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Group
- Haedar Akib dan Antonius Tarigan. 2000. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Kebijakan Publik*
- Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen. Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE
- Harbani, Pasolong. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta



- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jaya, Askar. 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*. Program Pasca Sarjana IPB. Bogor.
- Jingga Tadikapury, Violetta. 2011. *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Bank X TBK Kanwil X. [Skripsi]*. Makassar: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Hasanuddin.
- Marnelly, T.Romi. 2012. *Corporate Social Responsibility (CSR) : Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Vol. 02, No.02.
- Martoyo, Susilo. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Mas Achmad Daniri. 2005, *Good Coporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta : Ray Indonesia.
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta : UI Press.
- Mulyadi. 1984. *Akuntansi manajemen, Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Universitas Gadjah Mada
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawawi, Hadari. 2000. *Administrasi Personel Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Haji Intermedia
- Putra, S. Hikmawan. 2015. *Pilar-pilar Good Corporate Governance*. Diakses dari <https://hikmawansp.wordpress.com/2012/01/29/pilar-pilar-good-governance/> pada tanggal 27 Maret 2016 pukul 22.14
- Radyati, M.R.N. 2008. *CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal*. Jakarta : Indonesia Business Link.
- Saidi, Zaim dan Hamid Abidin. 2004. *Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Piramedia
- Saidi, Machfudz. 2015. *Semen Indonesia Atasi Sampah di Gresik Melalui Waste to Zero*. Diakses dari <https://machfudzsaidi.wordpress.com/semen-indonesia-atasi-sampah-di-gresik-melalui-waste-to-zero/> pada tanggal 2 November 2015 pukul 10.58 WIB.
- Salim, Emil. 1992. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES
- Siagian. 1980. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelittitan Survei*. Jakarta: LP3S.



- Steers, Richard M. 1980. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sucipto, Cecep Dani. 2012. *Teknologi Pengelolaan Daur Ulang Sampah*. Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Sugandhy, Aca, Rustam Hakim. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukada, Soni, dkk. 2007. *Membumikan Bisnis Berkelanjutan : Memahami Konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta : Indonesia Business Links.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surna Tjahja Djadiningrat, 2005, *Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban bagi Anak Cucu, Seputar Pemikiran*.
- Suryana, Siti Erna Latifi, 2009. *Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. Tesis. Program magister Studi Pembangunan , Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang : UBPress.
- Sutamihardja. 2004. *Perubahan Lingkungan Global*. Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana. IPB
- Soemarwoto, O . 1989. *Analisis Dampak Lingkungan, Cet. Ke 2*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Trager, I Nyoman, dkk. 2003. *Corporate Governance dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untung, Hendrik Budi, 2008. *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika.

Untung, Hendrik Budi. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wahyudi, Isa & Azheri, Busyra. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*. Malang: Setara Press.

Website Kabupaten Gresik. 2015. *Profil Gresik*. Diakses dari <http://www.gresikkab.go.id/> pada tanggal 2 November 2015 pukul 09.14 WIB.

Zauhar, Soesilo. 1996. *Administrasi Publik*. Malang: IKIP



## Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Semen Indonesia Foundation



### SURAT KETERANGAN

Nomor : 522/KM.15/01-01/07.16

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Soesetyoko Soewandi  
Jabatan : Ketua Pengurus Semen Indonesia Foundation  
Alamat : Perdin PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk C-20 Gresik 61122

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizky Nanda Amalia  
No. Mahasiswa : 125030105111001  
Jurusan : Administrasi Publik Universitas Brawijaya – Malang

Telah melaksanakan pengumpulan data untuk penyusunan Tugas Akhir pada :

Tanggal : 21 April – 21 Mei 2016  
Tempat : Semen Indonesia Foundation (SMIF)

Demikian, Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 29 Juli 2016  
Semen Indonesia Foundation  
Pengurus

SEMENTEN INDONESIA  
FOUNDATION

  
Soesetyoko Soewandi  
Ketua



## Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Ket: Bersama Bapak Hari, Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan (kiri) dan Bapak Yusuf, Manajer Divisi Pengelolaan Lingkungan (kanan)



Ket : Bersama Bapak Heru selaku Petugas Retribusi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik



Ket : Miniatur Pabrik *Waste to Zero*



Ket : Truk pengangkut sampah yang menyeter sampah dari masyarakat yang akan dikumpulkan di TPA Ngipik





Ket : Tumpukan sampah yang siap diproses



Ket : Sampah yang akan di proses dengan menggunakan excavator menuju hopper





Ket : Hasil dari pengelolaan *waste to zero*

